FENOMENA PARTISIPASI POLITIK PEDAGANG KAKI LIMA BINAAN PEMERINTAH KOTA DI SURABAYA SELATAN PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2015

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat

OLEH:
Ummul Faizah
E04212009

PRODI FILSAFAT POLITIK ISLAM

FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

2017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh *Ummul Faizah* ini telah disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 16 Oktober 2017

Pembimbing.

Dr. Aniek Nurhayati, M.Si
NIP. 196909071994032001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh *Ummul Faizah* ini telah dipertahankan di depan

Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 26 Oktober 2017

Mengesahkan

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Dekan,

Dr. Muhid, M. Ag
NIP. 196310021993032002

Tim Penguji:

Ketua,

Dr. Aniek Nurhayati, M.Si
NIP. 196909071994032001

Sekretaris,

M. Fathoni Hakim, M.Si
NIP. 198401052011011008

Penguji I,

Dr. Khoirul Yahya, S.Ag, M.Si
NIP. 197202062007101003

Penguji II,

Laili Bariroh, M.Si
NIP. 197711032009122002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Ummul Faizah

NIM : E04212009

Prodi : Filsafat Politik Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 26 Oktober 2017

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Ummul Faizah

E04212009

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Ummul Faizah
NIM : E04212009
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin / Filsafat Politik Islam
E-mail address : Vaizanora@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul : Fenomena Partisipasi Politik Pedagang Kaki Lima Binaan Pemerintah Kota di Surabaya Selatan Pada Pemilihan Kepala daerah 2015

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah sayaini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 03 Januar 2018

Penulis

( )
namaterangdantandatangan

ABSTRAK

Judul Skripsi : **Fenomena Partisipasi Politik Pedagang Kaki Lima Binaan Pemerintah Kota Di Surabaya Selatan Pada Pemilihan Kepala Darah 2015**

Pembimbing : **Dr. Aniek Nurhayati, M.Si**

Penulis : **Ummul Faizah**

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana motif partisipasi politik pedagang kaki lima binaan pemerintah kota di Surabaya selatan. Bagaimana bentuk partisipasi politik pedagang kaki lima binaan pemerintah kota di Surabaya slatan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan motif-motif partisipasi politik pedagang kaki lima binaan pemerintah kota di Surabaya selatan dan untuk mendeskripsikan bentuk partisipasi politik pedagang kaki lima binaan pemerintah kota di Surabaya selatan. Penelitian ini merupakan penelitian analisis deskriptif yaitu penelitian yang tujuannya untuk menguraikan, menerangkan atau menjelaskan secara mendalam tentang variabel tertentu. Sedangkan pengamilan data dilakukan kepada informan yang berasal dari kalangan PKL binaan pemkot dengan menggunakan metode wawancara.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa fenomena partisipasi politik pedagang kaki lima binaan pemerintah kota di Surabaya Selatan pada pemilihan kepala daerah 2015 tidak lepas dari adanya motif yang mendorong pedagang kaki lima binaan dalam berpartisipasi. Adapun motif dipengaruhi oleh adanya keyakinan dalam diri individu, orientasi pemimpin dan juga karena adanya kesadaran warga negara yang memiliki hak dan dan kewajiban untuk turut memberikan kontribusi bagi perkembangan bangsa. mereka berpartisipasi atas dasar pertimbangan rasional. Sebagian PKL binaan telah menilai secara objektif pilihannya dalam arti memiliki kesadaran diri dan secara sengaja sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab dua bahwa mereka berhasrat menjadi berpengetahuan, mempengaruhi suara legislator. Meski dengan adanya vote getter hal tersebut tidak mempengaruhi niat awal mereka untuk berpartisipasi berdasarkan pilihan yang yang telah ditentukan oleh diri mereka sendiri. Dan partisipasi politik pedagang kaki lima binaan ditunjukkan dalam bentuk memberikan suara atau votting dalam pilkada, mengikuti kampanye dan menjadi saksi dalam pemilu. Karena adanya keyakinan dalam diri individu dan rasa antusias yang cukup tinggi

Keyword: Partisipasi Politik, PKL Binaan, Pilkada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

COVER DALAM ..... **i**

PERSETUJUAN PEMBIMBNG ..... **ii**

PENGESAHAN SKRIPSI ..... **iii**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iv**

MOTTO ..... **v**

PERSEMBAHAN ..... **vi**

KATA PENGANTAR ..... **vii**

ABSTTRAK ..... **ix**

DAFTAR ISI ..... **xi**

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan Penelitian 8

D. Manfaat Penelitian 9

E. Definisi Konsep 9

F. Telaah Pustaka 11

G. Sistematika Pembahasan 15

BAB II : KERANGKA TEORITIK

A. Partisipasi Politik 16

1. Konsep Partisipasi Politik 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Motif Partisipasi Politik 19

3. Perspektif Partisipasi Politik 21

4. Bentuk-bebntuk Partisipasi Politik 24

5. Fungsi Partisipasi Politik 26

6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik 28

B. Fenomenologi 31

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian 34

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 34

2. Sifat Penelitian 35

3. Fokus Penelitian 35

4. Sumber Data 35

5. Lokasi dan Alasan Pemilihan 37

6. Teknik Pengumpulan Data 38

7. Teknik Analisa Data 41

8. Keabsahan Data 41

BAB IV : PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

B. Deskripsi Lokasi Penelitian 43

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 43

2. Letak Geografis dan Batas Wilayah 44

3. Demografi 45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Aspek Ekonomi 46

5. Aspek Budaya 46

6. Profil Sentra PKL Binaan Pemerintah Kota 50

B. Hasil Penelitian dan Analisa 53

1. Motif Partisipasi Politik Pedagang Kaki Lima Binaan Pemerintah Kota di Surabaya Selatan pada Pemilihan Kepala Daerah 2015 54

2. Bentuk-bentuk Partisipasi Politik Pedagang Kaki Lima Binaan Pemerintah Kota di Surabaya Selatan pada Pemilihan Kepala Daerah 2015 59

a. pemberian suara atau votting 59

b. kampanye 62

c. menjadi saksi dalam kegiatan pemilu 63

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan 66

B. Saran 67

DAFTAR PUSTAKA 68

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pilkada merupakan pesta demokrasi rakyat dalam memilih kepala daerah beserta wakilnya yang berasal dari usulan partai politik tertentu, gabungan partai politik atau secara independen dan yang telah memenuhi persyaratan. Pasca reformasi, demokrasi Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat Peningkatan partisipasi publik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara disalurkan melalui pengaturan mekanisme yang semakin mencerminkan prinsip keterbukaan dan persamaan bagi segenap warga Negara. Salah satu bentuknya adalah pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada).

Latar belakang yuridis pilkada langsung adalah UU No. 32 tahun 2004 sebagai revisi dari UU No. 22 Tahun 1999 yang memuat regulasi pilkada secara langsung. Seperti juga telah tertuang dalam pasal 18 ayat 4 UUD 1945, bahwa gubernur, bupati dan walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Hal itulah yang diatur dalam UU No. 32 tahun 2004 bagian ke delapan tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dalam pasal 56 (1) UU No.32 tahun 2004 disebutkan bahwa: ”Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil".[1] Tujuan utama pilkada langsung adalah penguatan masyarakat dalam rangka peningkatan kapasitas demokrasi di tingkat lokal dan peningkatan harga diri masyarakat yang sudah sekian lama dimarginalkan.

Di Surabaya pemilihan umum Wali Kota dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 untuk memilih Wali Kota Surabaya periode 2016–2021. Pelaksanaan pemilihan umum ini bersamaan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 9 Desember 2015. Terdapat dua pasang kandidat yang bersaing dalam pemilihan umum ini, yaitu pasangan petahanan Tri Rismaharini-Wisnu Sakti Buana yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), serta Rasiyo-Lucy Kurniasari yang diusung oleh Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN). Pemilihan umum ini akhirnya dimenangi oleh pasangan Tri Rismaharini-Wisnu Sakti Buana yang diusung oleh PDI-P dengan perolehan suara sebesar 893.087 (86,34%) sesuai dengan keputusan KPU Kota Surabaya pada 22 Desember 2015.[2]

Pilkada tentunya tidak terlepas dari yang namanya partisipasi, partisipasi pada dasarnya merupakan kegiatan warga negara dalam rangka ikut serta menentukan berbagai macam kepentingan hidupnya dalam ruang lingkup dan konteks masyarakat atau negara itu sendiri. Dalam sistem negara demokratis, partisipasi politik merupakan elemen yang penting. Hal ini didasari oleh

---

[1] www.kopertis4.or.id/aturan/undang undang/uu ttg Pemerintah dan daerah/No. 32 th 2004 ttg
Pemerintahan Daerah Penjelasannya, 20 Juli 2008 pukul 20.10

[2] https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Wali_Kota_Surabaya_2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keyakinan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan kolektif.

Dewasa ini telah disadari bahwa politik merupakan suatu hal yang sangat di prioritaskan, baik dalam tataran pusat maupun semua yang ada di tingkat daerah. Bila kita berbicara masalah politik maka tidak akan terlepas dari apa yang disebut partisipasi politik. Partisipasi politik sendiri itu merpakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan berdemokrasi, yang mana menuntut masyarakat berhak ikut serta menentukan isi kepitusan, baik menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.[3] Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik didorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan itu kepentingan mereka akan tersalur atau sekurangnya diperhatikan dan sedikit banyak dapat mempengaruhi tindakan yang berwenang yang diwujudkan dalam sebuah keputusan. Partisipasi politik merupakan aspek yang sangat penting dan merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Masing-masing masyarakat memiliki tingkat partisipasi politik yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya, yaitu (a) apatis, artinya orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik, (b) spektator, artinya orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum, (c) gladiator, yakni mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, seperti aktivis partai, pekerja kampanye, dan aktivis masyarakat, dan (d) pengritik, yaitu partisipasi dalam bentuk non-konvensional, Ini adalah kontras dengan pertama.

[3] Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia,1999), 140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tingkat partisipasi seseorang itu tentunya memang berbeda-beda dari masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya hal ini terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya: faktor sosial ekonomi, komunikasi politik, tingkat kesadaran politik,tingkat pengetahuan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan, kontrol masyarakat terhadap kebijakan publik, lingkungan, dan nilai budaya. Namun dalam penelitian yang akan dilakukan, penulis hanya akan membahas partisipasi politik dari segi motif dan bentuk partisipsi politik masyarakat. Hal ini disebabkan karena tingkat partisipasi politik masyarakat memiliki hubungan yang erat terhadap keberlangsungan pilkada, semakin tinggi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya maka akan memungkinkan tingkat partisipasi politik masyarkat semakin tinggi pula.

Masyarakat modern memiliki tingkat-tingkat partisipasi politik yang lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat tradisional, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan-perbedaan dalam struktur status sosial dari masyarakat tersebut. Adanya pembangunan sosio-ekonomi suatu masyarakat akan mengakibatkan kenaikan yang cukup linear dalam tingkat status masyarakat itu dan suatu perubahan yang curvilinear dalam pemerataan statusnya. Dengan keadaan ekonomi yang begitu susah, didukung lagi dengan keadaan politik dan pemerintahan yang dianggap sebagian orang kapitalis ini, maka masyarakat miskin beranggapan apakah mereka masih punya harapan untuk meminta perlindungan dan penghidupan yang lebih layak kepada pemerintah (policy makers) dengan ikut aktif berpartisipasi untuk mengisi ruang publik yang terbuka.orang-orang miskin biasanya tidak begitu antusias dalam berpartisipasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

politik. Hal ini disebabkan karena karena ketidaktahuan mereka rakyat miskin tidak memiliki sumber-sumber daya untuk berpartisipasi secara aktif dan efektif, informasi yang kurang memadai, tidak memiliki kontak-kontak yang tepat dan seringkali juga waktu. bagi kebanyakan orang miskin dalam kondisi-kondisi yang paling lazim, partisipasi politik, baik dulu maupun sekarang secara objektif merupakan suatu cara yang sulit dan mungkin tidak efektif untuk menanggulangi masalah-masalah mereka. hanya sebagian kecil saja dari orang-orang yang berpenghasilan dan berpendidikan rendah yang mempunyai minat dalam politik dan menganggap politik relevan dengan urusan mereka dan mereka juga merasa bisa ikut mempengaruhi pemerintah.

Adapun susunan masyarakat pada umumnya dibagi dalam tiga kelompok yaitu: tingkat tinggi, tingkat sedang, dan tingkat rendah. Adanya pembagian susunan kelompok tersebut dinilai dari status sosial masyarakat tersebut. Adapun status sosial itu pada umumnya dinilai dari tingkat pendidikan, besarnya jumlah pendapatan dan jenis pekerjaan seseorang dalam ruang lingkup masyarakat tersebut. Faktor utama yang mendorong orang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik adalah kepuasan finansial. Status sosial ekonomi yang rendah menyebabkan seseorang merasa teralienasi dari kehidupan politik, dan orang yang bersangkutan pun akan menjadi apatis. Hal ini tidak terjadi dengan orang yang memiliki kemapanan ekonomi.

Huntington dan Nelson memberikan definisi bahwa partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan pemerintah. Dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kegiatan politik pada struktur dan bentuk apapun, tidak akan terlepas dari tingkah laku manusianya sebagai penggerak kegiatan politik tersebut. Perilaku manusia dalam kehidupan politik ini sebagai perilaku yang tidak terpisah dari kelompok, golong atau partai. Dalam tinjauan pskologis setiap individu yang berada dalam situasi kebersamaan, akan menunjukkan gejala-gejala yang berbeda dibandingkan dengan individu yang tidak terikat oleh suatu kelompok atau golongan.

Masyarakat seperti pedagang tentunya memiliki kontribusi dalam perpolitikan di suatu daerah khususnya pedagang kaki lima termasuk dalam susunan masyarakat yang memiliki hak untuk menentukan kepala daerah di lingkungan kota Surabaya dan sangat berpengaruh untuk kemajuan daerah yang dipimpin. Para pedagang kaki lima yang dibina oleh pemerintah tidak hanya satu atau dua, namun berjumlah ratusan hingga ribuan para pedagang kaki lima yang mendapatkan pembinaan oleh pemerintah kota Surabaya baik penataan ruang dan tata cara berdagang di aera yang sudah ditentukan lokasinya. Dari penertiban tersebut para pedagang kaki lima dibina dan bergabung menjadi satu disuatu lokasi dan mendirikan sebuah anggota pedagang kaki lima. Ada yang pro pemerintah bagi yang mengikuti saran pemerintah dan ada juga yang kontra terhadap pemerintah.

Pedagang kaki lima adalah sektor informal yang jumlah eksistingnya paling banyak apabila dibandingkan dengan sektor informal lain. Keberdaan PKL di Surabaya tersebar hampir di seluruh titik kota, dengan konsentrasi terpadat ada di Surabaya pusat. Para PKL tersebut utamanya adalah penjual makanan dan minuman. Penjual ma-min (makanan dan minuman) ini tentu akan mencari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

daerah-daerah yang dekat engan pusat keramaian. Dan, Surabaya pusat sebagai sentral dari kegiatan perekonomian dan pust pemerintahan, sehingga konsentrasi pedagang kaki lima di Surabaya pusat tentu tak terelakkan lagi. Berikut data jumlah PKL berdasarkan jumlah administratifnya: Surabaya pusat dengan jumlah PKL 5.779, Surabaya timur dengan jumlah PKL 3.986, Surabaya barat dengan jumlah PKL 1.498, Surabya utara dengan jumlah PKL 2.834, Surabya selatan dengan jumlah PKL 4.776.[4] Berdasarkan hasil observasi, diketahui beberapa alasan seseorang memilih untuk menjadi pedagang kaki lima, namun tiga alasan terbanyak dikemukakan adalah sulitnya medapakan pekerjaan di sektor formal, tidak memiliki keahlian lain, dan keinginan untuk berwiraswasta. Guna mengatasi hal tersebut maka pemerintah surabaya telah melakukan satu bentuk pengelolaan sentra PKL. Sentra-sentra tersebut dibangun di beberapa titik yang menjadi titik konsentrasi PKL. Sentra yang dibangun tentu saja telah memenuhi standar kelayakan baik dari sisi kebersihan maupun kenyamanan. Sentra tersebut diprioritaskan bagi PKL yang ada di sekitar lokasi sentra. Melalui manajemen pengelolaan sentra yang baik, diharapkan sentra-sentra PKL akan berkembang menjadi potensi wisata tersendiri. Pemerintah kota Surabaya juga telah memberikan pembinaan pada PKL melalui pelatihan manajemen usaha, sosialisasi tentang pentingnya kesehatan produk, masalah perijinan, pemberian modal bergulir, pengelolaan limbah dan bantuan peralatan ringan.

Semakin banyak pedagang kaki lima binaan pemerintah kota surabaya yang berpartisipasi dalam kegiatan politik, hal ini menarik bagi penulis untuk

[4] www.surabaya.go.id>files>doc_765, 22 maret 2017 pukul 09:10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menganalisis partisipasi politik Masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang kaki lima. Penulis berupaya menjelaskan motif dan bentuk partisipasi pedagang kaki lima dalam kegiatan politik melalui pendekatan sosioligi politik. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas penulis akan membuat penulisan tentang "Fenomena Partisipasi Politik Pedagang Kaki Lima Binaan Pemerintah Kota Surabaya Pada Pemilihan Kepala Daerah 2015".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka peneliti perlu merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana motif partisipasi politik pedagang kaki lima binaan pemerintah kota di Surabaya selatan pada pemilihan kepala daerah 2015?
2. Bagaimana bentuk partisipasi politik pedagang kaki lima binaan pemerintah kota di Surabaya selatan pada pemilihan kepala daerah 2015?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mendeskripsikan motif partisipasi politik pedagang kaki lima binaan pemerintah kota di Surabaya selatan pada pemilihan kepala daerah 2015.
2. Untuk mendeskripsikan bentuk partisipasi politik pedagang kaki lima binaan pemerintah kota di Surabaya selatan pada pemilihan kepala daerah 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:

1. Secara teoritis

   Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan pengetahuan dan ilmu pengetahuan yang yang berhubungan dengan ilmupolitik yakni mengetahui tentang fenomena partisipasi politik pedagang kaki lima binaan. Selain itu, penelitian ini bisa sebagai acuan dalam memperkaya referensi khususnya tentang partisipasi politik.

2. Secara praktis

   Sedangkan dalam segi praktis hasil dari penelitian ini dapat diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap dunia politik khususnya di indonesia, yang merupakan gambaran realitas di masyarakat dewasa ini, khususnya partisipasi politik para pedagang kaki lima binaan di Surabaya selatan.

E. Definisi Konsep

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam memahami judul dalam penulisan ini dan untuk mempejelas interpretasi atau pemberian kesan, pendapat atu pandangan toeritis terhadap pokok bahasan proposal yang berjudul "Fenomena Partisipasi Politik Pedagang Kaki Lima (Studi Pedagang Kaki Lima Binaan Pemerintah Kota Surabaya Pada Pemilihan Kepala Daerah 2015)**.** Maka akan dijelaskan istilah-istilah yang terpakai dalam judul dan konteks pembahasannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Fenomena : Menurut Buchari Lapau, yaitu suatu hal yang bisa disaksikan dengan panca indera serta dapat dinilai dan diterangkan secara ilmiah. Dan menurut Fereddy Rrangkuti ialah, suatu fakta yang kita temui di lapangan. Sedang menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah hal-hal yang dapat disaksikan dengan pancaindra dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah (fakta atau kenyataan). Namun fenomena tiada lain adalah fakta lain yang disadari, dan masuk dedalam pemahaman manusia.[5]
2. Partisipasi : Dalam bahasa inggris yaitu *participation* dengan makna penganmbilan bagian atau pengikutsertaan. Menurut Keith Davish, suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya.
3. Politik : Proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud dalam proses pembuatan keputusan khususnya dalam Negara.
4. Pedagang kaki lima : Menurut Sudaryanti (Fakultas Hukum UNPAR), ialah pedgang golongan ekonomi lemah yang berjualan kebutuhan sehari-hari, makanan atau jasa relative kecil, modal sendiri atau modal lain, baik mempunyai tempat berdagang tetap atau tidak tetap (berpindah-pindah) pada tempat yang dianggap strategis dalam suasana informal.

[5] Engkus Kuswarno, *Fenomenologi:Konsepsi, Pedoman, dan Contoh Penelitiannya* (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Telaah Pustaka

Beberapa penelitian terdahulu yang pernah ada yang berhubungan dengan penelitian ini diantaranya adalah:

Pertama, Penelitian Omta Purba (2013), dengan judul "*Hubungan Tingkat Kesadaran Politik Dengan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Kegiatan Pemilukada 2010 Di Kelurahanan Timbangan Kecamatan Inderalaya Utara Kabupaten Ogan Ilir*". Penelitian ini menjelaskan tentang tingkat kesadaran politik masyarakat di kelurahan timbangan, bagaimana partisipasi masyarakat pada kegiatan pemilukada 2010 di kelurahan timbang, adakah hubungan antara tingkat kesadaran politik dengan partisipasi politik masyarakat pada kegiatan pemilukada 2010 di kelurahan timbangan.[6]

Kedua, Penelitian Laelah Kodariah (2012), yang berjudul "Partisipasi Politik Siswa MAN II Yogyakarta Dalam Pemilukada Tahun 2011 Di Kota Yogyakarta". Skripsi tersebut meneliti tentang bagaimana partisipai politik siswa dalam Pemilukada 2011 di Kota Yogyakarta. Hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa siswa MAN II Yogyakarta ikut berpartisipasi dalam Pemilukada yang dilakukan tahun lalu, dan diketahui pula bahwa bentuk partisipasi politik yang diikuti siswa diantaranya melakukan pemilihan, kampanye, bergabung

[6] Omta Purba, *Hubungan Tingkat Kesadaran Politik Dengan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Kegiatan Pemilukada 2010 Di Kelurahanan Timbangan Kecamatan Inderalaya Utara Kabupaten Ogan Ilir* (Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya), 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan kelompok kepentingan. dan bentuk partisipasi yang mendominasi dalam Pemilukada yang dilakukan oleh siswa adalah melakukan pemilihan.[7]

Ketiga, Penelitian Marlini Tarigan (2009), dengan judul "Partisipasi Masyarakat Kabupaten Temanggung Dalam Pelaksanaan Pilkada Tahun 2008".Penelitian ini berbentuk tesis sebagai tugas akhir. Dalam penelitian ini menyoroti masalah partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah. Penelitian ini menggunakan metode survai dengan maksud untuk penjelasan. Sasaran dalam penelitian ini adalah pemilih di Kabupaten Temanggung. Teknik pengambilan sampel adalah menggunakan sample acak 2 cabang yang menggabungkan sistem acak dan sistem acak proporsional. Adapun jumlah responden adalah 243 orang yang tersebar di 20 kecamatan se-Kabupaten Temanggung.[8]

Keempat, Penelitian Mamba'ul Ulum (2010), dengan judul "Respon Pedagang Kaki Lima (PKL) Terhadap Kebijakan Relokasi (Studi Kasus di Pagiyuban PKL Demantu Yogyakarta" dalam skripsinya menyimpulkan bahwa relokasi memberikan dampak bagi pedagang kaki lima (PKL), pemerintah dan masyarakat. dan adanya ketidak pastian informasi mengenai adanya tempat baru bagi PKL dan pemerintah hanya melakukan penataan dan tidak ada lokasi baru. Sedangkan penyusun lebih menekankan kepada implementasi dari dari relokasi

---

[7] Laelah Kodariah, *Partisipasi Politik Siswa MAN II Yogyakarta Dalam Pemilukada Tahun 2011 Di Kota Yogyakarta* (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), 2012.

[8] Marlini Tarigan, *Partispasi Masyarakat Kabupaten Temanggung Dalam Pelaksanaan Pilkada Tahun 2008* (Program Studi Magister Ilmu Politik, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang), 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dilakukan Dinas Perdagangan dan pasar, Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM, serta satpol PP dalam penertiban PKL..[9]

Kelima, Penelitian Arif Budiono (2011), dengan judul "Dampak Revitalisasi Alun-Alun Kota Kebumen Terhadap Perekonomian Pedagang Kaki Lima" disimpulkan bahwa revitalisasi alun-alun keta kebumen belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat serta belum mengenai sasaran. Setelah adanya revitalisasipun memberikan dampak bagi PKL terutama dalam penghasilan yang yang masih sama.[10]

Keenam, Penelitian Nur Fitriana Kusumaningtyas (2009), dengan judul "Respon Pedagang Klithikan Terhadap Implementasi Kebijakan Penataan PKL (Studi Relokasi Pasar Klithikan di jalan Mangkubumi Yogyakarta)" Ia menyimpulkan bahwa lahirnya relokasi sebagai akibat tidak tertibnya pedagang kaki lima (PKL), di lain sisi relokasi membawa dampak terjadinya demo para pedagang dan termarjinalnya pedagang.[11]

Sementara karya-karya yang berbentuk bukuyang penulis telusuri, diantaranya:

Pertama, karya Miriam Budiardjo (1998), dengan judul "*konsep partisipasi politik*". Buku ini menjelaskan tentang pengertian partisipasi politik, bentuk-bentuk partisipasi politik. Dalam buku ini menyinggung bahwa kesadaran

---

[9] Mambau'ul Ulum, *Respon Pedagang Kaki Lima (PKL) Terhadap Kebijakan Relokasi (Studi Kasus di Pagiyuban PKL Demantu Yogyakarta* (Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), 2010.

[10] Arif Budiono, *Dampak Revitalisasi Alun-Alun Kota Kebumen Terhadap Perekonomian Pedagang Kaki Lima* (Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), 2011.

[11] Nur Fitriana Kusumaningtyas, *Respon Pedagan Klithikan Terhadap Implementasi Kebijakan Penataan PKL (Studi Relokasi Pasar Klithikan di jalan Mangkubumi Yogyakarta)* (Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

politik yang tinggi akan sanat berpengaruh pada tingkat partisipasi politik seseorang.[12]

Kedua, karya Miriam Budiardjo (1982), dengan judul "*partisipasi dan partai politik sebuah bunga rampai*". Dalam buku ini membahas tentang cara-cara berpartisipasi, bagaimana hubungan partisipasi politik dengan partai politik. Buku ini juga membahas tentang partisipasi politik dalam konteks pembangunan.[13]

Demikian dilihat dari beberapa contoh penelitian terdahulu yang disampaian diatas terdapat perbedaan penelitian terdahulu dengan peneitian yang dilakukan oleh penulis dimana perbedaan tersebut terletak pada objek yang diteliti, yaitu pedagang kaki lima (PKL) binaan pemerintah kota (pemkot) Surabaya, sebab penulis belum menemukan penelitin mengenai partisipasi politik pedagang kaki lima (PKL), terutama penelitian ini menitikberatkan kepada pedagang kaki lima (PKL) binaan pemerintah kota yang ada di Surabaya.

[12] Miriam Budiardjo, *Partisipasi Politik* (Jakarta: PT. Gramedia, 1998).

[13] Miriam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik Sebuah Bunga Rmpai* (Jakarta: Yauyasan Obor Indonesia, 1998).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Sistematika Pembahasan

Sebagaimana kemampuan yang ada pada penulis maka pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yang terdiri dari sub-sub bab yang disusun sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang merupakan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi konsep, telaah pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, dalam bab ini berisi tentang teori-teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu teori partisipasi politik beserta turunannya dan fenomenologi.

Bab ketiga, metodologi penelitian yang meliputi metode penelitian, metode pengumpulan data, teknik anaslisa data dan keabsahan data.

Bab keempat berisi setting penelitian meliputi deskripsi lokasi penelitian dan profil sentra-sentra PKL binaan, dan analisis hasil penelitian dan pembahasan tentang fenomena partisipasi politik pedagang kaki lima binaan pemerintah kota.

Bab kelima, berisi penutup yaitu kesimpulan dan saran-saran dari penulis terhadap hasil penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KERANGKA TEORITIK

A. Partisipasi Politik

Secara etimologi Partisipasi berasal dari bahasa latin, yaitu *pars* yang berari bagian dan *capere* yang berarti mengambil. Bila digabungkan maka dapat kita artikan "mengambil". Dalam bahasa inggris, *participate* atau *participation* berarti mengambil bagian atau mengambil peranan. Jadi partisipasi politik dapat kita artikan dengan mengambil bagian atau mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik suatu Negara.

Partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.[1] Partisipasi politik adalah bagian penting dalam kehidupan politik suatu negara, terutama bagi negara yang menyebut dirinya sebagai negara demokrasi, partisipasi politik merupakan salah satu indikator utama. Artinya, suatu negara dapat disebut sebagai suatu negara demokrasi jika pemerintah yang berkuasa memberi kesempatan yang seluas luasnya kepada warga negara untuk berpartisipasi dalam kegiata politik. Sebaliknya, warga negara yang bersangkutan juga harus memperlihatkan tingkat partisipasi politik yang cukup tinggi. Jika tidak, maka kadar kedemokratisan negara tersebut masih diragukan. Masalah partisipasi politik bukan hanya

[1] Ramlan Surbakti, *Memehami Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia, 1999),142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyangkut watak atau sifat dari pemerintahan negara, melainkan lebih berkaitan dengan sifat dan karakter masyarakat suatu negara dan pengaruh yang ditimbulkan.[2]

1. Konsep Partisipasi Politik

Menurut Gabriel Almond, partisipasi politik tidak hanya sebatas mengambil bagian atau peranan dalam konteks kegiatan politik. Akan tetapi, menurutnya partisipasi politik selalu diawali oleh adanya arkulturasi kepentingan dimana seorang individu mampu mengontrol sumber daya politik, seperti hanya seorang pemimpin partai politik atau seorang menciptakan militer. Peran mereka sebagai *aggregator* politik (penggalang/penyatu dukungan) akan sangat menentukan bagi bentuk partisipasi politik selanjutnya. Menurutnya, negara besar memiliki bangunan organisasi yang telah terspesialisasi dalam menyalurkan bentuk agregasi politik berikut kebijakan terkait menghasilkan partai politik. Oleh Karena itu partisipasi politik menurut Gabriel almond, terbagi kedalam tiga kategori, yaitu: artikulasi kepentingan, penyatuan kepentingan, dan artikulasi kepentingan.[3]

[2] Komarudin Sahid, *Memahami Sosiologi Politik* (Bogor:Ghalia Indonesia,2011),175.

[3] Ibid.,176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gaventa dan valderama (2001) menyatakan, bahwa partisipasi politik melibatkan interaksi perorangan atau organisasi, biasanya partai politik, parta politik dengan negaranya. Karena itu partisipasi politik sering kali dihubungakn dengan demokrasi politik, perwakilan, dan partisipasi tak langsung.[4]

Adapun pendapat dari pakar politik lain yang telah banyak memberi batasan yang lebih mengenai partisipasi politik. Hebert McClosky dalam *Internaionanl Encyclopedia of the Social Sciences* memberikan pengertian mengenai partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan suka rela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum. (*The term "political participation"will refer to those voluntary activities by which members of a society share in the selection of rulers and, directly or indirectly, in the formation of public policy*).[5]

Sementara menurut Huntington dan Nelson paritisipasi politik adalah kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang di maksudkan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan pemerintah. Dari konsep ini memang tidak dibedakan secara tegas apakah partisipasi politik itu bersifat otonom atau mobilisasi.[6]

---

[4] Ibid., 176-177.

[5] Miriam Budiarjo, *Demokrasi di Indonesia; Demokrasi Parlemen dan Demokrasi Pancasila* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995)183-184. Dikutip dari Herbert McClosky, "*Political participation*", *International Encyclopedia of the Social Sciences*, edisi ke-2 (New York: The Macmillan Company and The Free Press, 1972), XII. 3.

[6] Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang,* Alih bahasa Sahat Simamora (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Motif Partisipasi politik

Berbagai faktor meningkatkan atau menekan partisipasi politik. Salah satu perangkat faktor seperti itu menyangkut motif orang yang membuatnya ambil bagian. Motif-motif ini seperti gaya partisipasi yang diberikannya berbeda-beda dalam beberapa hal : [7]

a. Sengaja-tak sengaja

Beberapa warga negara mencari informasi dan peristiwa politik untuk mencapai tujuan tertentu. Mereka bisa berhasrat menjadi berpengetahuan, mempengaruhi suara legislator, atau mengarahkan kebijaksanaan pejabat pemerintahan. Bagi mereka politik itu bertujuan dan hal yang disengaja. Yang lain melakukan kegiatan politik hampir secara kebetulan, barangkali mereka terlibat ke dalam cerita politik, menemukan stiker kampanye menempel pada bumper mobil dan sebagainya. Yang menyebabkan mereka berpartisipasi adalah karena keadaan, bukan dengan secara sengaja.

b. Rasional-emosional

Orang yang berhasrat mencapai tujuan tertentu, yang dengan teliti mempertimbangkan alat alternatif untuk mencapai tujuan itu, dan kemudian memilih yang paling menguntungkan dipandang dari segi pengorbanan dan hasilnya, disebut*bermotivasi rasional*. Sebaliknya, beberapa orang yang bertindak tanpa berfikir, semata-mata karena dorongan hati. Kecemasan, kekhawatiran, frustasi, kecenderungan,

[7] Dan Nimmo, *Komunikasi Politik Khalayak dan Efek* (Bandung:PT REMAJA ROSDAKARYA,2006), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

praduga harapan dan cita-cita, dan perasaan lain yang tidak ditentukan, *telah memotivasi partisipasi emosional (sering dengan gaya ekspresif).*

c. Kebutuhan psikologis-sosial

Kadang-kadang orang memproyeksikan kebutuhan psikologis mereka pada objek-objek politik. Misalnya dalam mendukung pemimpin politik karena kebutuhan yang mendalam untuk tunduk kepada autoritas, atau ketika memproyeksikan ketidakcukupannya pada berbagai kelas "musuh" politik yang dipersepsi-minoritas, negara asing, atau politikus dari partai oposisi. Yang lain menggunakan politik untuk meningkatkan persahabatan sosial, mengindentifikasikan diri dengan orang-orang yang statusnya diinginkan, atau meningkatkan posisi kelompok sosial mereka terhadap kelompok sosial yang lain.

d. Diarahkan dari dalam-dari luar

Perbedaan partisipasi politik yang diarahkan dari dalam diri pribadi dan dari luar erat hubungannya dengan motivasi batiniah dan motivasi sosial untuk partisipasi politik orang yang diarahkan oleh dirinya sendiri adalah orang yang beraksi sendiri,yaitu orientasi dan kecenderungannya diperoleh dari bimbingan orang tuanya : *"Karena arah yang diambil dalam kehidupannya telah dipelajari dalam keluasan pribadi dalam rumah tangga (keluarga) dari sejumlah kecil pedoman, maka orang yang dirahkan oleh dirinya sendiri bisa sangat stabil"*. Sebaliknya, orang yang diarahkan dari luar lebih kosmopolitan menanggapi berdasarkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orientasi yang diperoleh dari lingkungannya yang jauh lebih luas ketimbang hanya orang tua. Moral dan prinsip memotivasi orang yang diarahkan oleh dirinya sendiri, hasrat untuk menyesuaikan diri dan berada di dalam secara sosial mendorong orang yang diarahkan dari luar.

e. Berfikir-tanpa berfikir

Setiap orang berbeda dalam tingkat kesadarannya ketika menyusun tindakan politik. Perilaku yang dipikirkan meliputi interpretasi aktif dari tindakan seseorang dan perkiraan konsekuensi tindakan itu terhadap dirinya dan orang lain. Kegiatan yang tidak dipikirkan seperti terseret orang banyak, membuat kerusuhan tanpa tujuan, partisan yang bersemangat atau meneriakan dengan slogan idiologi-menunjukkan kurangnya penggunaan pikiran di pihak individu. Misalnya bisa jadi seseorang tidak bermaksud ikut dengan demonstrasi yang menggunakan kekerasan, tetapi ia terseret oleh keadaan dan peristiwa.

3. Perspektif partisipasi politik

Dalam kepustakaan ilmu politik, dikenal adanya rumus manusia politik dari Harold D.Lasswell yaitu politik: p1dr= P. artinya, pribadi (p) ditransformasikan (1) dan dipindahkan (d) ke gelanggang politik, kmudian dirasionalkan (r) menurut kepentingan public dan atau nilai komunitas yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diterima secara luas. Hal tu dapat dipahami bahwa factor kepribadian sangat memengaruhi sosialisasi politik dan partisipas politik (perilaku politik).[8]

Aktivitas manusia politik di gelanggang (ruang) politik, pada dasarnya merupakan tindakan politik atau partisipasi politik yang dikembangkan melalui pengalaman atau aplikasi sosialisai politik. Secara umum partisipasi politik dijlaskan oleh Miriam Budiardjo sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik seperti memilih pimpinan Negara, dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (public policy).[9]

Perspektif dan pendapat pakar ilmu politik itu tentu berbeda dengan perspektif dan pandangan para pengkaji komunikasi politik, bedasarkan *paradigma mekanitis*, partisipasi politik itu tidak lain dari reaksi khalayak politik sebagai salah satu bentuk efek politik dari komunikasi politik. Sedang berdasarkan *paradigm pragmatis*, partisipasi politik itu dapat dipandang sebagai tindakan politik yang dapat diamati polanya untuk dibuat prediksi ke masa depan. Khalayak yang berpartisipasi atau tidak berpartisipasi dalam dalam politik dikaji dalam *paradigma psikologis*, karena setiap individu khalayak memiliki filter konseptual, yang berfungsi menyerap atau menolak kampanye politik atau pemasaran politik yang merangsangnya.[10]

---

[8] Anwar Arifin, *Komunikasi Politik: Filsafat-Paradigma-Teori-Tujuan-Strategi dan Komunikasi Politik Indonsia* (Yogyakarta:GRAHA ILMU,2011), 210.

[9] Ibid.,210

[10] Ibid.,211

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kenyataannya tindakan politik warga Negara itu memang selalu bergerak dari tidak terlibat sama sekali, terlibat secara terbatas sampai dengan terlibat secara penuh dalam kegiatan politik. Mereka yang tidak terlibat sama sekali dalam kegiatan politik dalam arti sikap masa bodoh atau apati *(apathy)* dapat disebabkan karena: (1) sikp acuh tak acuh, (2) tidak tertarik pada politik, (3) kurang mengerti masalah politik, atau (4) tidak yakin bahwwa usaha dalam memengaruhi kebijakan publik akan berhasil. Meskipun demikian apati *(apathy)* itu selain dapat diartikan negative, jugadapat memberi arti positif. McClosky menyatakan bahwa sikap masa bodoh atau apati itu berguna dalam memberikan fleksibilitas kepada system politik, karekakalu semua warga Negara itu aktif dalam kegiatan politik, justru dapat menimbulkan prtikaian, fragmentasi, dan stabilitas sebagai konsekwensi ketidak puasan politik.[11]

Dari perspektif yang lain terdapat juga pendapat bahwa warga Negara yang tidak ikut memilih misalnya, mungin Karena yakin keadaan sudah stabil dan siapapun yang terpilih tidak akan mengubah keadaan. Justru itu warga Negara yang di sebut apati *(apathy)* itu, tidak berkonotasi negatif atau kecewa, melainkan sudah merasa puas dan percaya terhadap system politik yang ada. Sebaliknya warga Negara yang apati atau masa bodoh itu, selain Karena kecewa atau frustasi terhadap kehidupan politik yang ada, tetapi juga merasa bahwa kandidat yang maju dalam pemilihan, tidak ada yang memenuhi syarat untuk memperbaiki keadaan politik. Selain itu, dapat juga terjadi warga Negara yang sengaja tidak mau berpartisipasi, merupakan sebuah bentuk

[11] Ibid.,211-212

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

protes kepada rezim yang berkuasa. Jika hal itu terjadi maka berarti sosialisasi politik dan komunikasi politik tidak berjalan efektif sesuai dengan harapan. Partisipasi politik yang bersifat positif harus dipandang sebagai salah satu tujuan dalam sosialisasi politik dan komunikasi politik. [12]

4. Bentuk-bentuk Partisipasi Politik

Partispasi politik dapat dilihat dari berbagai sudut pandang.Bentuk umum dari partisipsi politik adalah pemberian suara pada saat pemilihan umum (pemilu).Bentuk partisipasi politik paling minim seperti ini dapat dijumpai pada sistem demokratik sampai paling otoritarian. Adapun bentuk-bentuk partisipasi politik yang ada pada sistem politik terbagi menjadi level atau derajat pemberian partisipasi seperti tergambar pada tabel berikut.[13]

Tabel. 1 :Bentuk dan Derajat Partisipasi Politik Almond

Bentuk	Ruang lingkup	Derajat
Voting (pemberian suara)	Luas, keputusan pemerintah	Sedang
Informal group (kelompok informal), social movement (pergerakan sosial)	Aktivitas kolektif, kebijakan umum	Tinggi
Direct contact (kontak langsung)	Spesifik, urusan personal / pribadi	Rendah
Protest activity (aktivitas protes)	Ekspresif, urusan spesifik	Tinggi

Sumber: Komarudin Sahid, *Memahami Sosiologi Politik*. Diambil dari Gabriel A. Almond, et al "C*omparative Politics Today: A World View"*

[12] Ibid.,212.

[13] Komarudin Sahid, *Memahami Sosiologi Politik*, (Bogor:Ghalia Indonesia,2011), 178- 179.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai perbandingan, Almond mencntohkan bentuk dan derajat partisipasi politik diberbagai negara didunia pada tahun 1990-1993, antara lain AS (49%), jerman barat (82%), inggris (72%), perancis (68%), selain dilihat dari sudut pandang partisipasi politik, Almond membagi bentuk partisipasi politik berdasarkan kelompok-kelompok berikut:[14]

a. Kelompok kepentingan adalah mereka dapat duduk dalam badan pengawas pemerintah (*ombudsman*), misalnya dalam masalah pelayanan publik.
b. Kelompok anomik adalah kelompok yang terbentuk secara sepontan karena rasa frustasi, putus asa, kecewa, dan emosi lain, mereka turun ke jalan karena merasa ketidak adilan. Pada saat seperti ini sangat memungkinkan kekerasan akan terjadi karena kelompok yang ada dan terorganisasi semisal partai politik tidak mampu mewakili kepentingan mereka yang marah dalam sistem politik. Kekerasan dapat meledeak pada saat tidak terduga dan tidak terkendali, walaupun kelompok anomik ada pula yang secara sengaja diorganisir untuk kepentingan politik tertentu.
c. Kelompok non-asosiasional adalah mereka sangat jarang sekali terorganisasi, disebabkan aktivitas mereka yang sangat episodik. Perbedaan dari kelompok anomik adalah dasar mereka membentuk kelompok karena kesamaan kepentingan, etnik, wilayah, agama, pekerjaan, tali kekeluargaan. Kelompok ini bisa berkelanjutan bila

[14] Ibid., 180.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibandingkan dengan kelompok anomik. Kelompok anomik terbagi dua yaitu ;

1) kelompok besar, terorganisasi
2) sub-kelompok kecil pedesaan, mengenal satu sama lain sehingga lebih efektif.

5. Fungsi Partisipasi Politik

Sebagai suatu tindakan atau aktivitas, baik secara individual maupun kelompok, partisipasi politik memiliki beberapa fungsi. Robert Lane, dalam studinya tentang keterlibatan politik, menemukan empat fungsi partisipasi politik bagi individu-individu.[15]

a. Sebagai sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomis.
b. Sebagai sarana untuk memuaskan kebutuhan bagi penyesuaian sosial.
c. Sebagai sarana untuk mengejar nilai-nilai khusus.
d. Sebagai sarana untuk memenuhi keutuhan alam bawah sadar dan kebutuhan psikologis tertentu.

Dari sisi lain, Arbi Sanit memandang ada tiga fungsi partisipasi politik.[16]

a. Memberikan dukungan kepada penguasa dan pemerintahan yang di bentuknya beserta sistem politik yang di bentuknya.
b. Sebagai usaha untuk menunjukkan kelemahan dan kekurangan pemerintah.

[15] Ibid.,184.
[16] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Sebagai tantangan terhadap penguasa dengan maksud menjatuhkannya sehingga kemudian diharapkan terjadi perubahan structural dalam pemerintahan dan dalam sistem politik, misalnya melaalui pemogokan, huru-hara, dan kudeta.

Partisipasi politik juga memiliki kepentingan pemerintah.Untuk kepentingan pemerintah, partipasi politik memiliki fungsi berikut.[17]

a. Untuk mendorong program-program pemerintah. Hal ini berarti bahwa peran serta masyarakat diwujudkan untuk mendukung program politik dan program pemerintah.
b. Sebagai institusi yang menyuarakan kepentingan masyarakat untuk masukan bagi pemerintah dala mengarahkan dan meningkatkan pembangunan.
c. Sebagai saran untuk memberikan masukan, saran dan kritik terhadap pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan program-progra pembangunan.

Untuk menyampaikan nilai-nilai, sikap-sikap, pandangan-pandangan, dan keyakinan-keyakinan politik diperlukan sarana-sarana. Untuk itu selanjutnya Almond menyebutkan adanya enam sarana (agen sosialisasi politik) yaitu keluarga, sekolah, kelompok bergaul atau bermain, pekerjaan , media massa dan kontak-kontak politik langsung.

[17] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Factor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik

Sebagai sebuah kegiatan tentu partisipasi politik memiliki banyak factor yang dapat mempengaruhinya, menurut Surbakti terdapat dua variabel yang dapat memberikan pengaruh terhadap tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang, dua variable tersebut yaitu:[18] Sebagai sebuah kegiatan tentu partisipasi politik memiliki banyak factor yang dapat mempengaruhinya, menurut Surbakti(dalam Suharno,2004: 108) terdapat dua variabel yang dapat memberikan pengaruh terhadap tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang, dua variable tersebut yaitu:[19]

a. Aspek kesadaran politik seseorang yang meliputi kesadaran terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara. Misalnya hak-hak politik, hak ekonomi, hak mendapatkan perlindungan hukum, hak mendapatkan jaminan sosial, dan kewaiban-kewajiban seperti kewajiban dalam system politik, kewajiban kehidupan sosial dan kewajiban lainnya.
b. Menyangkut bagaimanakah penilaian dan apresiasi terhadap pemerintah, baik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahannya.

Partisipasi politik masyarakat memiliki perbedaan dalam intensitas dan bentuknya. Hal itu di samping berkaitan dengan sistem politik, juga berhubungan dengan perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Meluasnya partisipasi politik di pengaruhi oleh beberapa hal yang menurut Weimer (dalam sudjiono sastroadmodjo, 1995: 89-90) disebutkan

[18] Ibid., 185.
[19] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

paling tidak terdapat lima. Dari kelima hal yang dapat menyebabkan timbulnya gerakan ke arah partisipasi yang lebih luas dalam proses politik itu.

a. Faktor yang pertama ialah modernitas. Modernitas di segala bidang berimplikasi pada komersialisasi pertanian industrilisasi,meningkatnya arus urbanisas, peningatan kemapuan baca tulis, perbaikan pendidikan, dan pengembangan media massa/ media komunikasi secara lebih luas. Kemajuan itu berakibat pada partisipasi warga kota baru seperti kaum buruh kaum pedangang, dan profesional untuk ikut serta mempengaruhi kebijakan dan menuntut keikutsertaannya dalam kekuasaan politik sebagai bentuk kesadaran bahwa mereka pun dapat mempengaruhi nasibnya sendiri.[20]
b. Faktor yang ke dua adalah terjadinya perubahan-perubahan struktur kelas sosial. Perubahan struktur kelas baru itu sebagai akibat dari terbentuknya kelas menengah dan pekerja baru yang makin meluas dalam era industriliasi dan modernitas. Dari hal itu muncul persoalan yaitu siapa ang berhak ikut serta dalam pembuatan keputusan-keputusan politik yang berakhir membawa perubahan-perubahan dalam pola partisipasi politik. Kelas menengah baru itu secara kritis menyuarakan kepentingan-kepentingan masyarakat yang terkesan secara demokratis.[21]
c. Pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi masa merupakan faktor meluasnya partisipasi masyarakat. Ide-de baru seperti nasionalisme, liberalisme, dan egaliterisme membangkitkan tuntutan-

[20] Ibid., 185.
[21] Ibid., 186.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tuntutan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Komunikasi yang meluas mempermudah penyebaran ide-ide itu dalam seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat yang belum maju sekalipun akan dapat menerima ide-ide politik tersebut secara cepat. Hal itu berimplikasi pada tuntutan-tuntutan rakyat dalam ikut serta menentukan dan mempengaruhi kebijakan pemerintah.[22]

d. Faktor ke empat ialah adanya konflik antara pemimpin-pemimpin politik. Pemimpin politik yang bersaing memperebutkan kekuasaan seringkali untuk mencapai kemenangan dilakukan dengan cara mencari dukungan masa. Dalam konteks ini mereka beranggapan adalah sah apabila yang mereka lakukan demi kepentingan rakyat dan dalam upaya memperjuangkan ide-ide partisipasi masa. Implikasinya adalah munculnya tuntutan terhadap hak-hak rakyat, baik hak asasi manusia, keterbukaan, demokratisasi, maupun isu-isu kebebasan pers. Dengan demikian pertentangan dan perjuangan kelas menengah terhadap kaum bangsawan yang memegang kekuasaan mengakibatkan perluasaan hak pilih rakyat.[23]

e. Sebab kelima, menurut weimer ialah adanya keterlibatan pemerintah yang semakin mmeluas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Meluasanya ruang lingkup aktifitas pemerintah ini seringkali merangsang tumbuhnya tuntutan yang terorganisir untuk ikut serta dalam

[22] Ibid., 186.
[23] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempengaruhi pembuatan keputusan politik. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari perbuatan pemerintah dalam segala bidang kehidupan.[24]

Dalam konteks Indonesia Arbi Sanit menyebutkan terdapat lima faktor yang mendorong partisipasi politik masyarakat Indonesia, yaitu:[25]

a. Adanya kebebasan berkompetisi disegala bidang termasuk dibidang politik.
b. Adanya kenyataan berpolitik secara luas dan terbuka.
c. Adanya keleluasaan untuk mengorganisasi diri, sehingga organisasi masyarakat dan partai politik dapat tumbuh dengan subur.
d. Adanya penyebaran sumber daya politik dalam masyarakat yang berupa kekayaan dalam masyarakat.
e. Adanya distribusi kekuasaan dikalangan masyarakat sehingga tercipta suatu perimbangan kekuatan.

B. Fenomenologi

Fenomenologi menurut para ahli:

1. Alfred schutz

Menurut Schutz tugas fenomologi adalah menghubungkan antara pengetahuan ilmiah dengan pengalaman sehari-hari, dan dari kegiatan dimana pengalaman dan pengetahuan itu berasal. Dengan kata lain mendasarkan

[24] Ibid.
[25] Ibid., 187.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tindakan sosial pada pengalaman, makna, dan kesadaran.[26] Menurut pemikiran Schutz, manusia mengkontruksikan makna diluar arus utama pengalaman melalui proses "tipikasi". Hubungan antar makna pun diorganisasi melalui proses ini, atau bisa disebut stock of knowledge. Jadi kumpulan pengetahuan tentang dunia.

Inti pemikiran Schutz adalah bagaimana memahami tindakan sosial melalui penafsiran. Proses penafsiran dapat digunakan untuk memperjelas atau memeriksa makna yang sesungguhnya, sehingga dapat memberikan konsep kepekaan yang implicit. Schutz meletakkan hakikat manusia dalam pengalaman subjektif, terutama ketika mengambil tindakan dan mengambil sikap terhadap kehidupan sehari-hari, dalam hal ini, Schutz mengikuti pemikiran Husserl, yaitu proses pemahaman actual kegiatan kita. Dan pemberian makna terhadapnya, sehingga terefleksi dalam tingkah laku.[27]

Dalam pandangan Schutz, manusia adalah makhluk sosial, sehingga kesadaran akan dunia kehidupan sehari-hari adalah sebuah kesadaran sosial. Dunia individu merupakan dunia intersubjektif dengan makna beragam, dan perasaan sebagai bagian dari kelompok. Manusia dituntut untuk saling memahami satu sama lain, dan bertindak dalam kenyataan yang sama. Dengan demikian ada penerimaan timbale balik, pemahaman atas dasar pengalaman bersama, dan tipikasi atas dunia bersama. Melalui tipikasi inilah manusia belajar menyesuaikan diri kedalam dunia yang lebih luas, dengan juga melihat

[26] Engkus Kuswarno, *Fenomenologi* (Bandung: Widya Padjadjaran, 2013), 17.
[27] Ibid.,18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diri kita sendiri sebagai orang yang memainkan peran dalam situasi tipikal.[28] Bagi Schutz, tindakan manusia adalah bagian dari posisinya dalam masyarakat. sehingga tindakan seseorang itu bisa jadi hanya merupakan kamuflase atau peniruan dari tindakan orang lain yang ada di sekelilingnya.[29]

[28] Ibid.,
[29] Ibid.,38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah-masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, dan diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya[1]. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui studi penelitian lapangan. Maka untuk memperoleh kevalid-an data penulis melakukannya dengan cara mengumpulkan data melalui hasil obervasi, wawancara secara mendalam serta dokumentasi.[2] yaitu pada sejumlah pedagang kaki lima binaan pemerintah kota surabaya, yang di lengkapi dengan literatur-literatur pendukung. Dan Pendekatan yang penyusun gunakan adalah pendekatan analisis deskriptif, yaitu penelitian yang tujuannya untuk menguraikan, menerangkan atau menjelaskan secara mendalam tentang variabel tertentu dalam menganalisa

[1] Wardi Bachtiar, *Metode Penelitian Ilmu Dakwah* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 1.

[2] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 225.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fenomena sosial berupa partisipasi politik pedagang kaki lima binaan pemerintah kota di Surabaya selatan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, artinya menggambarkan, menguraikan dan menganalisa data secara jelas kemudian memberikan penilaian secara komprehensif tentang masalah yang dikaji. Pada hal ini penyusun akan meneliti yakni tentang fenomena partisipasi politik pedagang kaki lima binaan pemerintah kota Surabaya.

3. Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini adalah fenomena partisipasi politik pedagang kaki lima binaan pemerintah kota di Surabaya selatan. Dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif, peneliti berusaha untuk menguraikan, menganalisasi, dan menjelaskan motif serta bentuk-bentuk partisipasi politik pada pemilihan kepala daerah 2015.

4. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data-data tersebut diperoleh. Sumber dalam penelitian ini adalah:

1) Sumber data primer

Data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian, sehingga dapat memperoleh data yang konkret pada objek yang akan diteliti. Berhubung objek yang akan diteliti adalah partisipasi politik PKL binaan, maka peneliti akan mendapatkan data dimana sentra-sentra PKL itu berada. Tempat sentra-sentra PKL ini berlokasi di beberapa titik daerah Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selatan. Selain itu juga informan yang dirasa representatif dalam penelitian ini bukan hanya yang ada dalam strutur penting dalam masyarakat saja melainkan meraka yang sekalipun tidak masuk dalam struktur tetapi berpengaruh penting dalam masyarakat. Adapun informannya adalah sebagai berikut:

1. Ibu Niah selaku penjual makanan dan minuman dengan nomor stan 11 yang berlokasi di sentra PKL gayungan. Informan ini berguna untuk pemenuhan data tentang fenomena partisipasi politik pedagang kaki lima binaan pemerintah kota surabaya.
2. Ibu Nur Aini penjual makanan dan minuman dengan nomor stan 22 yang berlokasi di sentra PKL gayungan. Informan ini berguna untuk pemenuhan data tentang fenomena partisipasi politik pedagang kaki lima binaan pemerintah kota surabaya.
3. Ibu Pur penjual makanan dan minuman dengan nomor stan 8 yang berlokasi di sentra PKL jambangan. Informan ini berguna untuk pemenuhan data tentang fenomena partisipasi politik pedagang kaki lima binaan pemerintah kota Surabaya.

2) Sumber data sekunder

Sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, seperti contoh lewat orang lain. Oleh karena itu data ini berupa bahan kajian yang digambarkan tidak dengan orang yang ikut hadir dalam kejadian berlangsung, sehingga sumber data bersifat penunjang dan melengkapi data primer. Selanjutnya dalam penelitian ini jenis sumber

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

data yang digunakan adalah literatur dan dokumentasi. Sumber literatur adalah referensi yang digunakan untuk memperoleh data teoritis dengan cara mempelajari dan membaca literatur yang ada hubungannya dengan kajian pustaka dan permasalahan penelitian baik itu yang berasal dari buku ataupun yang berasal dari internet seperti jurnal online, artikel atau berita online yang memuat berita tentang partisipasi politik dalam pemilihan kepala daerah.

5. Lokasi dan Alasan pemilihan

Peneliti mengambil lokasi penelitian di Surabaya bagian selatan atau lebih tepatnya dibeberapa titik sentra PKL binaan yang berlokasi di daerah Surabaya selatan yaitu sntra PKL Gayungan, Karah dan Jambangan. Alasan memilih lokasi penelitian tersebut dikarenakan pertimbangan pertama adalah unsur keterjangkauan lokasi penelitian oleh peneliti, baik dilihat dari segi tenaga maupun dari segi efisiensi waktu. Pelaksanaan penelitian di lokasi yang dipilih tidak menimbulkan masalah dalam kaitannya dengan kemampuan tenaga peneliti, selain itu pemilihan lokasi penelitian ini dapat memberikan efisiensi waktu dan masih dapat melaksanakan tugas pokok peneliti. Kemudian ada alasan lain yang tidak kalah pentingnya dan pertimbangan yang lebih mendasar dalam pemilihan lokasi penelitian ini. pertimbangan tersebut ialah adanya karakteristik khusus yang melekat pada setting yang dipilih. Pengamatan sementara menunjukan bahwa sentra PKL yang telah dilakukan penelitian ini peneliti mendapat respon baik dari informan. Bahan pertimbangan lainnya adalah kelangkaan penelitian yang berkaitan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

partisipasi politik PKL binaan. Sampai saat ini belum dilakukakan penelitian yang dimaksudkan untuk menganalisis atau mengevaluasi mengenai partisipasi politik PKL binaan dan belum pernah dilakukan penelitian yang dimaksudkan untuk mengkaji ulang hal tersebut.

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi yang diharapkan, pengumpulan data dilakukan melalui tiga instrument, yaitu:

1) Observasi

Observasi (pengamatan) adalah alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang di selidiki.[3] Dalam teknik bservasi ini peneliti mengamati secara langsung dan cermat terhadap perilaku individu. Karena dengan teknik ini segala tingkah laku dan aktivitas subyek penelitian sehari-hari bisa diketahui, sebab dengan observasi merupakan alat yang ampuh untuk menguji suatu kebenaran.

Dalam observasi ini dibutuhkan kemampuan peneliti secara optimal baik dari segi motif, kepercayaan, perhatian, kebebasan terhadap fenomena yang terjadi di lapangan, untuk dapat berpartisipasi di tempat lokasi penelitian dengan maksud untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan, maka peran aktif peneliti di lapangan sangat diperlukan.

[3] Cholid Narbuko & Abu Achmadi, *Metodologi Penellitian Cet. 1* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejalan dengan hal tersebut, peneliti terlibat langsung dalam penelitian. Langkah yang diambil pada tahap ini adalah melakukan pengamatan langsung terhadap pedagang kaki lima binaan pemerintah kota Surabaya dan melakukan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang ditemukan.

2) Wawancara (interview)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara bertanya langsung secara bertatap muka (*face to face*) dengan daftar pertanyaan, dan disertai dengan alat perekam (*interview guide*) atau panduan wawancara.[4] Jenis wawancara yang di lakukan *In-depth interview* adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan peoman (*guide*) wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.[5]

Tujuan dilakukan teknik ini adalah untuk mengungkap data yang sangat susah dilakukan dengan *interview* biasa, karena menyangkut informasi yang sensitf seperti menyangkut nialai, kepercayaan, maupun keyakinan.[6] Pencarian data dengan wawancara terbuka (open interview).[7]

---

[4] M. Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), 234.

[5] Ivan Afriani HS, "Metode Penelitian Kualitatif", http://www.penalaran-unm.org (10 Agustus 2010)

[6] Arief D Wijaya, "*in depth interview* – Sesi Metode Pengumpulan Data", wordpress.com (?)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kepada pihak pedagang kaki lima binaan pemerintah kota surabaya. Dan menggunakan *interview guide*, sebagai panduan pertanyaan mengenai masalah yang diteliti.

3) Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek semdiri atau oleh orang lain tentang subjek. Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang tertulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.[8]

Dokumentasi berasal dari kata"dokumen" yang berarti barang-barang tertulis, dokumentasi disebut juga metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri historis. Dokumentasi dilakukan penulis di sentra PKL binaan yang menjadi sasaran penelitian serta pada masyarakat sekitar. Yang menjadi bagian dokumentasi dalam penelitian ini merupakan catatan dari hasil wawancara dari informan yang akan diwawancarai oleh peneliti.

---

[7] Kuntjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1997), 139.

[8] Haris Hardiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyunsun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyunsun kedalam pola, memilih yang penting, memilih yang akan dipelajari, kemudian membuat kesimpulan sehingga mudah untuk dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.[9] Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara beulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis diterima, maka hipotetsis tersebut berkembang menjadi teori.

8. Keabsahan Data

Validitas merupakan derajad ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data ynag tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Terdapat dua macam validitas penelitian, yaitu validitas internal

[9] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 244.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan validitas eksternal. Validitas internal berkenaan dengan derajad akurasi desain penelitian dengan hasil yang dicapai. Sedangakan validitas eksternal berkenaan dengan derajad akurasi apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi dimana sampel tersebut diambil. Dalam hal reliabilitas menurut Susan Stainback[10] menyatakan bahwa reliabilitas berkenaan dengan derajad konsistensi dan stabilisasi data atau temuan. Dalam penelitian ini akan digunakan cara triangulasi, triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu. Khusunya triangulasi teknik, triangulasi teknik yaitu untuk menguji kredibilitas data dan dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data di peroleh dengan wawancara lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi.

[10] Ibid., 267.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat melakukan kegiatan penelitian untuk memperoleh data yang berasal dari informan. Penentuan lokasi penelitian sangatlah penting sesuai dengan menentukan penelitian atau mempermudah dalam menentukan penelitian.

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Surabaya sebagai Ibu Kota Propinsi Jawa Timur terletak di wilayah utara Jawa Timur dan memiliki wilayah pantai dan laut. Kota Surabaya di utara berbatasan dengan Selat Madura, di timur berbatasan dengan Selat Madura dan Laut Jawa, di selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo dan di Barat berbatasan dengan Kabupaten Gresik. Sekarang Kota Surabaya telah terhubung ke pulau madura oleh jembatan Suramadu.[1]

Namun penelitian ini dilakukan dibeberapa titik sentra-sentra PKL binaan pemkot Surabaya yaitu gayungan, jambangan, dan karah yang berlokasi di Surabaya bagian selatan.

[1] https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Surabaya (18 mei 2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Letak Geografis dan Batas Wilayah

Secara geografis, Kota Surabaya merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata antara 3-6 meter dpl tapi ada beberapa daerah yang tingginya 25-50 meter dpl. Luas wilayah Kota pahlawan mencapai 326,36 km^2 yang dibagi menjadi 31 Kecamatan dan 163 Kelurahan. Secara astronomis terletak diantara $07^0$09'-$07^0$21' Lintang Selatan dan $112^0$36'-$112^0$54' Bujur Timur. Iklim yang ada di Kota yang namanya berasal dari kata Sura dan Buaya ini adalah iklim tropis dimana hanya ada dua musim dalam setahun yaitu musim hujan dan kemarau.[2]

Surabaya terletak di tepi pantai utara provinsi Jawa Timur. Wilayahnya berbatasan dengan Selat Madura di sebelah utara dan timur, Kabupaten Sidoarjo di sebelah selatan, serta Kabupaten Gresik di sebelah barat. Sebagian besar wilayah Surabaya merupakan dataran rendah yaitu 80,72% dengan ketinggian antara -0,5 – 5m SHVP atau 3 – 8 m di atas permukaan laut, sedangkan sisanya merupakan daerah perbukitan yang terletak di wilayah Surabaya Barat (12,77%) dan Surabaya Selatan (6,52%). Di wilayah Surabaya Selatan terdapat 2 bukit landai yaitu di daerah Lidah dan Gayungan yang ketinggiannya antara 25 – 50 m di atas permukaan laut dan di wilayah Surabaya Barat memiliki kontur tanah perbukitan yang bergelombang. Struktur tanah di Surabaya terdiri dari tanah aluvial, hasil endapan sungai dan pantai, dan di bagian barat terdapat perbukitan yang

[2] https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Surabaya (18 mei 2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengandung kapur tinggi. Di Surabaya terdapat muara Kali Mas, yakni satu dari dua pecahan Sungai Brantas. Kali Mas adalah salah satu dari tiga sungai utama yang membelah sebagian wilayah Surabaya bersama dengan Kali Surabaya dan Kali Wonokromo. Areal sawah dan tegalan terdapat di kawasan barat dan selatan kota, sedangkan areal tambak berada di kawasan pesisir timur dan utara.[3]

Utara : Selat Madura

Selatan : Kabupaten Sidoarjo

Barat : Kabupaten Gresik

Timur : Selat Madura

3. Demografi

Secara demografis wilayah Kota Surabaya memiliki penduduk hingga akhir tahun 2009 sebanyak 2.938.225 jiwa dengan komposisi 50,20% laki-laki dan 49,80% peremuan. Komposisi penduduk Kota Surabaya berdasarkan kelompok umur/struktur usia pada tahun 2009 menunjukkan, bahwa proporsi terbanyak adalah pada kelompok usia 35 – 40 tahun (283.822 jiwa), selanjutnya adalah pada kelompok usia 30 – 35 tahun (283.365 jiwa) dan 25 – 30 tahun (279.688 jiwa).

[3] https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Surabaya#cite_note. (18 mei 2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Aspek Ekonomi

Letak Kota Surabaya yang sangat strategis berada hampir di tengah wilayah Indonesia dan tepat di selatan Asia menjadikannya sebagai salah satu *hub* penting bagi kegiatan perdagangan di Asia Tenggara. Sebagai kota metropolitan, Surabaya menjadi pusat kegiatan ekonomi, keuangan, dan bisnis di daerah Jawa Timur dan sekitarnya. Sebagai salah satu pusat perdagangan, Surabaya tidak hanya menjadi pusat perdagangan bagi wilayah Jawa Timur, namun juga memfasilitasi wilayah-wilayah di Jawa Tengah, Kalimantan, dan kawasan Indonesia Timur. Surabaya dan kawasan sekitarnya merupakan kawasan yang paling pesat pembangunan ekonominya di Jawa Timur dan salah satu yang paling maju di Indonesia. Selain itu, Surabaya juga merupakan salah satu kota terpenting dalam menopang perekonomian Indonesia. Sebagian besar penduduknya bergerak dalam bidang jasa, industri, dan perdagangan. Surabaya adalah pusat perdagangan yang mengalami perkembangan pesat.[4]

5. Aspek Budaya

Kebudayaan Jawa di Surabaya memiliki ciri khas dibandingkan dengan daerah lainnya, yakni karakteristiknya yang lebih *egaliter* dan terbuka. Surabaya dikenal memiliki beberapa kesenian khas, yaitu:[5]

[4] https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Surabaya#Perekonomian. (20 mei 2017)

[5] https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Surabaya#Kebudayaan. (20 mei 2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Ludruk, adalah seni pertunjukan drama yang menceritakan kehidupan rakyat sehari-hari.

b. Tari Remo, adalah tarian selamat datang yang umumnya dipersembahkan untuk tamu istimewa

c. Kidungan, adalah pantun yang dilagukan, dan mengandung unsur humor

Selain kesenian di atas, budaya panggilan *arek* atau *rek* (panggilan khas Surabaya) juga menjadi ciri khas yang unik. Di samping itu, di Surabaya juga dikenal panggilan khas lainnya, yakni *Cak* untuk laki-laki dan *Ning* untuk perempuan. Sebagai upaya untuk melestarikan budaya, setiap satu tahun sekali diadakan pemilihan Cak & Ning Surabaya. Cak & Ning Surabaya dan para finalis terpilih merupakan duta wisata dan ikon generasi muda kota Surabaya. Setiap setahun sekali diadakan Festival Cak Durasim (FCD), yakni sebuah festival seni untuk melestarikan budaya Surabaya dan Jawa Timur pada umumnya. Festival Cak Durasim ini biasanya diadakan di Gedung Cak Durasim, Surabaya. Selain itu ada juga Festival Seni Surabaya (FSS) yang mengangkat segala macam bentuk kesenian misalnya teater, tari, musik, seminar sastra, pameran lukisan. Pengisi acara biasanya selain dari kelompok seni di Surabaya juga berasal dari luar Surabaya. Diramaikan pula pemutaran film layar tancap, pameran kaos oblong dan lain sebagainya. Festival Seni Surabaya ini diadakan setiap satu tahun sekali di bulan Juni dan biasanya bertempat di Balai Pemuda.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain kebudayaan Jawa, sebagai kota yang mengalami perkembangan pesat, di Surabaya juga terjadi pencampuran beragam kebudayaan dari Madura, Islam, Arab, Tionghoa, dan lain sebagainya.

a. Pendidikan

Surabaya merupakan salah satu kota tujuan pendidikan di Indonesia. Ribuan siswa maupun mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia mengenyam pendidikan di kota ini. Di kota Surabaya terdapat berbagai macam tingkatan pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini yaitu kelompok bermain, hingga pendidikan tinggi yaitu akademi, institut, politeknik, sekolah tinggi, hingga universitas. Beberapa universitas dan institut negeri ternama yang ada di Surabaya adalah Universitas Airlangga (UNAIR), Universitas Negeri Surabaya (UNESA), dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS). Di Surabaya juga terdapat beberapa sekolah atau instansi pendidikan swasta yang ternama, di antaranya adalah PPPK Petra, Tarakanita, dan lain sebagainya.[6]

b. Agama

Agama Islam adalah agama mayoritas penduduk Surabaya. Surabaya merupakan salah satu pusat penyebaran agama Islam yang paling awal di tanah Jawa dan merupakan basis warga Nahdlatul 'Ulama yang

[6] https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Surabaya#Pendidikan. (20 mei 2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beraliran moderat. Masjid Ampel didirikan pada abad ke-15 oleh Sunan Ampel, salah satu pioner Walisongo.[7]

Agama lain yang dianut sebagian penduduk adalah Kristen Protestan; Katolik Roma; Hindu; Buddha; dan Konghucu. Walaupun Islam merupakan mayoritas di Surabaya, namun kerukunan umat beragama untuk saling menghormati; menghargai; dan menolong sesamanya cukuplah besar. Hal ini terlihat dari bangunan Masjid Al-Akbar yang merupakan masjid terbesar kedua di Indonesia setelah Masjid Istiqlal, Jakarta. Di Surabaya juga terdapat Masjid Cheng Ho yang terletak di daerah Ketabang yang memiliki arsitektur layaknya kelenteng. Selain itu, di kota ini juga berdiri Gereja Bethany yang merupakan salah satu gereja terbesar di Indonesia, dan gedung Graha Bethany di daerah Nginden, Surabaya yang merupakan salah satu gedung gereja terbesar di Asia Tenggara. Tidak hanya itu saja, di Surabaya juga banyak terdapat yayasan sosial berasaskan agama, yang bekerja sama dalam berbagai kegiatan bakti sosial. Bahkan ada beberapa wadah kerukunan umat beragama di Surabaya yang sering eksis dalam menyikapi permasalahan sosial agar antar-sesama masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang akan merusak persatuan dan kesatuan masyarakat Jawa Timur serta bangsa Indonesia. Agama lainnya yang ada di Surabaya adalah agama Yahudi. Penganut agama Yahudi umumnya adalah imigran

[7] https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Surabaya#Agama. (20 mei 2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yahudi asal Irak & Belanda. Hal ini semakin jelas dengan adanya makam khusus orang Yahudi di daerah Kembang Kuning, Surabaya.[8]

c. Kesehatan

Di Surabaya, terdapat rumah sakit yang dikelola berbagai pihak baik pemerintah daerah, hingga swasta. Beberapa rumah sakit di Surabaya bahkan mendapat sertifikat ISO. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) juga tersebar di seluruh Surabaya. Di beberapa titik kota Surabaya juga terdapat beberapa klinik pengobatan herbal dan tradisional untuk pengobatan dengan bahan-bahan alami.[9]

6. Profil Sentra PKL Binaan Pemerintah Kota

Kegiatan berdagang sebagai PKL yang terbina secara khusus oleh Pemkot Surabaya ternyata dapat memberikan dampak positif dalam peningkatan kesejahteraan PKL, dan dari segi sosial mereka dapat dikatakan PKL resmi karena mendapat supervisi langsung dari Pemkot serta pembinaan-pembinaan secara berkala dan terstruktur sehingga keberadaannya di masyarakat tidak mengganggu kondisi lingkungan sekitarnya justru keberadaan mereka dapat menambah warna baru bagi masyarakat. Keberhasilan ini berupa peningkatan kesejahteraan PKL.

[8] https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Surabaya#Agama. (20 mei 2017)

[9] https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Surabaya#Kesehatan . (20 mei 2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagian besar PKL sudah memiliki rumah tinggal, namun baru sebagian kecil saja yang berstatus rumah pribadi, sedangkan sebagian besar yang lainnya masih berstatus kontrak atau kost. Sebagian besar PKL sudah mampu menyekolahkan putra-putrinya sampai dengan jenjang setingkat SMA, namun baru sebagian kecil saja yang mampu menyekolahkan purtaputrinya sampai dengan perguruan tinggi. Namun secara umum kegiatan berdagang sebagai PKL yang dibina secara khusus oleh Pemkot Surabaya ternyata dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan PKL.

PKL yang dibina adalah mereka yang ber-KTP Surabaya kemudian PKL Binaan diwajibkan atas mereka pasal-pasal yang harus mereka penuhi yang telah tertuang seluruhnya dalam Perda No. 17 Tahun 2003 dan perda No. 17 Tahun 2004. Pasal-pasal yang dipenuhi oleh para PKL Binaan tertuang dalam wujud kewajibankewajiban. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap PKL-PKL tiap sentra setelah menerima hak atas mereka yang selayaknya. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan informasi bahwasannya Dinas Koperasi dan UMKM sebagai dinas dibawah naungan Pemkot Surabaya yang diberikan kewenangan dalam mengintervensi dan memberikan pembinaan membebaskan seluruh PKL Binaannya di tiap sentra PKL dari pungutan retribusi (uang legas) baik dalam bulanan maupun tahunan. Selain dibebaskan dari pungutan retribusi (uang legas), PKL juga dibebaskan dari kewajiban mengurus surat perpanjangan izin berjualan di lokasi sentra tersebut. Meskipun Pemkot Surabaya membebaskan mereka dari kewajiban retribusi dan izin perpanjangan dalam berjualan, namun masih ada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewajiban-kewajiban lainnya yang harus mereka lakukan sebagai rasa ikut memiliki dan menjaga sentra PKL yang ditempati yaitu dengan melakukan kegiatan menjaga kebersihan/ keindahan lingkungan di lokasi sentra PKL, menjaga fasiltas-fasilitas yang diberikan di dalam sentra PKL (TV, panggung, perlengkapan hiburan, serta rombong bagi yang diberi fasilitas rombong), maupun melaksanakan himbauan-himbauan yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM sebagai bentuk intervensi dan pengontrolan kegiatan PKL dilapangan. Meskipun ada kewajiban sebagaimana disebutkan di atas, namun tidak ada sanksi jika PKL tidak melaksanakan kewajiban menjaga kebersihan/keindahan dan menjaga fasilitas yang diberikan di dalam sentra PKL.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat retribusi dalam bentuk lain yang harus dikeluarkan oleh setiap PKL di tiap sentra PKL. Bentuk retribusi lain tersebut adalah iuran sampah yang dibayarkan setiap hari dengan nominal antara Rp. 2.000 – 3.000. Iuran sampah ini wajib dilaksanakan demi memenuhi kewajiban utama yang dimandatkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM yakni untuk menjaga kebersihan dan keindahan lokasi sentra PKL. Meskipun PKL masih dibebani kewajiban, yaitu berupa membayar iuran sampah setiap hari sebesar Rp.2.000 sampai dengan Rp.3.000,-, namun tidak ada sanksi yang diberikan kepada PKL jika mereka tidak mau membayarnya. Kemudian diperoleh informasi bahwa kebanyakan para PKL di setiap sentra menyatakan keterjaminannya dalam berjualan setelah bergabung menjadi PKL Binaan dalam satu sentra PKL. Keterjaminan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dimaksud adalah meraka merasa tidak akan diusik ketenangannya dalam berjualan berupa penggusuran, pemindahan, ataupun bentuk-bentuk lainnya. Para PKL juga menyatakan sebelum menjadi PKL Binaan Pemkot yang tergabung dalam satu sentra, mereka masih memiliki rasa belum terjamin atau was-was dalam berdagang meskipun kebanyakan dari mereka belum pernah terkena penggususran oleh SATPOL PP.

Pembentukan sentra PKL telah mengalokasikan dana tahunan untuk membangun tiap sentra-sentra PKL di wilayah di Kota Surabaya. Hal ini adalah bentuk jaminan lainnya yang diberikan oleh Pemkot Surabaya kepada para PKL Binaannya di tiap sentra PKL. Bentuk komitmen tambahan tersebut adalah suatu cara untuk meyakinkan para PKL Binaannya bahwa dengan masuknya para PKL sebagai PKL Binaan Pemkot Surabaya, para PKL akan mendapatkan keuntungan yang tidak didapatkan ketika masih belum berstatus sebagai PKL Binaan. Anggaran yang disisihkan oleh Pemkot Surabaya tersebut adalah hasil musyawarah dan kesepakatan antara Pemkot Surabaya (Bappeko) yang diwakili oleh Dinas Koperasi dan UMKM dengan kecamatan setempat yang didalam wilayahnya terdapat paguyuban PKL.

B. Hasil Penelitian dan Analisa

Data-data yang diperoleh oleh peneliti sesuai dengan hasil dilapangan, secara sistematis disusun untuk menjelaskan jawaban dari permasalahan yang ada dalam skripsi. Beberapa informan yang ditemui, dimohon kesanggupan dan kesiapannya unuk diwawancarai oleh penulis sehingga dapat menggali data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

darinya tentang fenomena partisipasi politik pedagang kaki lima binaan pemerintah kota di Surabaya selatan pada pemilihan kepala daerah 2015. Dalam mencari data peneliti melakukan wawancara langsung dengan subjek yang dijadikan *key informan*, PKL binaan pemkot yang aktif politik pada pilkada Surabaya 2015.

Berdasarkan data-data yang ditemukan oleh peneliti dilapangan, peneliti menganalisa dengan menggunakan teori fenomenologi karena keikutsertaan PKL dari lingkup binaan pemkot merupakan fenomena yang sering muncul dikalangan masyarakat sekitar.

1. **Motif partisipasi politik pedagang kaki lima binaan pemerintah kota di Surabaya selatan pada pemilihan kepala daerah 2015.**

   Di dalam berpartisipasi politik masyarakat PKL binaan pemkot khususnya tidak terlepas dari motif-motif yang menjadi dorongan atas keterlibatan di dalamnya. Motif PKL binaan pemkot dalam berpartisipasi pada kegiatan pemilu tahun 2015 bisa disebabkan karena dorongan dari dalam dirinya sendiri maupun juga disebabkan oleh faktor dari luar.

   Pilkada bagi sebagian besar masyarakat telah dianggap sebagai suatu kewajiban yang harus diikuti oleh setip warga negara yang baik. Dengan berpartisipasi memberikan suara dalam pilkada setidaknya ada kontribusi dan harapan masyarakat akan kemajuan negeri ini. Hal ini kemudian menjadi suatu bentuk motivasi dalam diri seseorang untuk memberikan suara dalam pemilu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pilihan politik masyarakat merupakan suatu cerminan atau refleksi akan harapan-harapan yang diinginkan terutama perubahan kearah perbaikan bangsa. Sejak era reformasi digulirkan telah terjadi pergantian kepemimpinan nasional. Namun dari semuanya itu stabilitas politik nasional hingga saat ini masih belum tertata dengan baik meskipun semangat demokrasi semakin meningkat. Keinginan, harapan, dan kerinduan akan perbaikan kemudian terelaborasi menjadi motivasi nilai dan keyakinan seseorang dalam menentukan pilihan politiknya. Pilihan politik dan pemimpin dalam pilkada tahun 2015 juga terlihat dalam wawancara dengan ibu niah yang menungkapkan sebagai berikut:

> kita kan sudah tahu kalau bu Risma itu bagaimana orangnya... jadi kinerjanya kan bagus, jadi kan rakyat ini bisa memilih orang-orang mana yang harus kita pertahankan dan orang yang kita pilih. Jadi kita tidak perlu memilih harus dikasih uang, nggak… ndak ada seperti itu, ya cuma kita kan tau orangnya bagaimana.[10]

Senada dengan apa yang diungkapkan diatas, informan yang lain yakni Ibu puer dalam wawancara menyampaikan bahwa:

> iya.. kan saya lihat itu orangnya kan.. yaapa ya mbak, mau turun gitu lo ke masyarakat sampek kayak gitu. Saya salut sama bu risma, ya orang-orang masyarakat kan sudah tau sepak terjangnya bu risma seperti apa ke orang kecil-kecil. Kalau untuk pasangan satunya kan belum tau pas itu. untuk saya sih kalau memang bu risma masih bisa untuk naik lagi yaa.. apa nggak bisa bu risma aja gitu…orang kan sudah tahu sepak terjangnya gimana-gimana kan tau. Cekatan juga orangnya kalau ada banjir ada apa langsung dia keluar sendiri kayak gitu.. waktu apa itu yang dibungkul rusak taman marah-marah itu gara-gara ice cream gratisan. Ya.. seperti itu mbak orangnya.[11]

---

[10] Niah, *Wawancara*,Surabaya, 15 Maret 2017.

[11] Puer, *Wawancara*, Surabaya, 16 Maret 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa calon yang sudah menjadi pilihan mereka adalah figur bijaksana, baik hati, pintar dan wawasan luas. Namun figur wali kota yang paling banyak memperoleh penghargaan baik Nasional, Regional mapun Internasional. Tidak hanya popular di mata masyarakat dengan tampilannya yang khas Surabaya ini, tetapi juga dikenal sebagai walikota yang tak segan terjun langsung ke lapangan memantau dan menangani berbagai problem Kota Surabaya. Hal ini terlihat jelas dalam kepemimpinannya pada periode sebelumnya maupun sekarang. Begitu pula dengan yang diunkapkan oleh Bapak Ahmad sebagai berikut:

> kalau pemilu terakhir saya lebih pro ke bu risma mbak… karena dari periode sebelumnya beliau sangat bagus programnya, PKL binaan ini kan programnya bu risma juga jadi bisa dilihatlah hasilnya sudah dua periode kami didalam binaan pemkot.[12]

Dari hasil wawancara dengan Bapak Ahmad dapat dijlaskan bahwa beliau memiliki tujuan yang jelas untuk memilih yaitu untuk mecari peminpin yang bertanggung jawab serta peduli pada rakyatnya. Tingginya partisipasi masyarakat surabaya dalam pilkada 2015 tidak terlepas dari terbentuknya antusiasme didalam momentum politik pilkada 2015 hal ini dapat dilihat dari pengakuan dari masyarakat PKL binaan yang menentukan pilihan dan menggunakan hak politiknya. Adapun yang mendukung fenomena politik ini diakibatkan dari terbentuknya kesadaran dan antusiasme masyarakat yang mandiri untuk menggunakan hak politiknya.

[12] Ahmad, *Wawancara*, Surabaya, 3 April 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara jelas peneliti menghubungkan fenomena tersebut dengan teori fenomenologi dengan mengikuti pemikiran dari Alfred Schutz. Menurutnya fenomenologi adalah menghubungkan antara pengetahuan ilmiah dengan pengalaman sehari-hari, dan dari kegiatan dimana pengalaman dan pengetahuan itu berasal.[13] Intinya adalah bagaimana memahami tindakan sosial melalui penafsiran dalam pandangan bahwa manusia adalah makhluk sosial, sehingga kesadaran akan dunia kehidupan sehari-hari adalah sebuat kesadaran sosial. Permasalahan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari dalam buku Dan Nimmo dikenal dengan istilah motif partisipasi politiknya. Secara sengaja beberapa warga Negara mencari informasi dan peristiwa politik untuk mencapai tujuan tertentu. Mereka bisa berhasrat menjadi berpengetahuan, mempengaruhi suara legislator, atau mengarahkan kebijaksanaan pejabat pemerintahan. Bagi mereka politik itu bertujuan dan hal yang disengaja. Secara rasional yaitu orang yang berhasrat mencapai tujuan tertentu, yang dengan teliti mempertimbangkan alat alternatif untuk mencapai tujuan itu, dan kemudian memilih yang paling menguntungkan dipandang dari segi pengorbanan dan hasilnya disebut *bermotivasi rasional*.

Seperti dalam penuturan ketiga informan diatas menyatakan bahwa mereka memutuskan untuk terlibat dalam hal politik yaitu partisipasi. Karena mereka memandang tokoh tersebut merupakan sosok yang bijaksana, pintar dan bertanggung jawab.

[13] Engkus Kuswarno, *Fenomenologi* (Bandung: Widya Padjadjaran, 2013), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fenomena diatas jelas menunjukkan bahwa partisipasi PKL binaan masih dipengaruhi oleh orientasi pemimpin. Yang mana pemimpin merupakan faktor penting dalam pembentukan perilaku meilih. Tingkah laku pemilih tersebut oleh Milbrath dan Goel, dinyatakan sebagai suatu bentuk kondisi yang berkenaan dengan perangsang politik. Dimana keterbukaan dan kepekaan seseorang melalui orientasi memberikan semacam dorongan bagi PKL binaan untuk berpartisipasi dalam pilkada. Akan tetapi Weber justru meberikan pandangan bahwa tindakan PKL binaan yang demikian merupakan suatu tindakan yang berangkat dari emosi dan perasaan atau dinamakan dengan tindakan afektual emosional.

Selain dari orientasi pemimpin partitisipasi PKL binaan ini juga berangkat dari kesadaran diri yang kuat untuk mengaktualisasikan kemampuan dan harapan-harapannya terhadap suatu sistem politik. Seperti yang dialami oleh Ibu Niah dan Ibu Puer bahwa motif partisipasi mereka adalah karena menginginkan sebuah system politik yang baik dengan melihat kinerja yang bagus dan program-program yang baik dalam periode sebelumnya.

Hal tersebut ditas sesuai dengan pandangan Surbakti juga bahwa motif partisipasi politik seseorang berangkat dari adanya kesadaran politik akan hak dan kewajiban sebagai warga Negara. Ia menambahkan bahwa kesadaran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

politik merupakan pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik tempat ia hidup.[14]

2. Bentuk partisipasi politik pedagang kaki lima binaan pemerintah kota di Surabaya selatan pada pemilihan kepala daerah 2015.

a. Votting atau pemberian suara

Terbukanya demokrasi secara luas di Indonesia memberikan angin segar dalam perkembangan dinamika perpolitikan bangsa ini. Salah satu indiktornya adalah berjalannya suatu system politik secara demokratis dan untuk mengukur terleluasakannya partisipasi masyarakat dalam bidang politik adalah melalui pemberian suara secara langsung atau *votting* dalam pemilu.

Dalam kehidupan sosial mulai dari lembaga yang terkecil seperti keluarga, RT, sampai dengan lingkup berbangsa tidak dapat dipungkiri bahwa kehidupan manusia senantiasa mengalami dinamika. Artinya perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat tidak dapat dihindari. Demikian juga dengan pilihan politik, tentunya masing-masing individu memiliki pola pikir dan cara pandang yang berbeda dalam melihat persoalan.

Berkaitan dengan pemilihan kepala daerah 2015, PKL binaan pemerintah kota dalam menentukan pilihan politiknya telah mampu secara sadar dan mandiri untuk dapat menentukan pilihan politiknya. Perbedaan pilihan politik dalam keluarga ternyata tidak terlalu berdampak pada pola

[14] Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1999), 144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hubungan keluarga atau sampai menimbulkan konflik. Hal ini karena masing-masing anggota memiliki kesadaran dan pemahaman akan pilihan politik masing-masing.

Dalam terpilihnya pasangan Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana tidak lepas dari peran PKL binaan pemkot yang ikut serta dalam pilkada, Seperti yang diungkapkan oleh ibu Puer sebagai berikut:

> "Iya saya selalu ikut mbak kalau ada pencoblosan itu, lah kan hak pilih saya masih aktif jdi saya pakai hak pilih saya ini mbak.. yang terakhir bu risma ini kan yaa.."[15]

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Puer dapat dijelaskan bahwa beliau memang memiliki rasa peduli dan atusianme yang tinggi terhadap dunia politik dengan selalu andil dalam mengikuti pemilihan di tempat pemungutan suara atau yang sering disebut dengan TPS. Beliau juga mengatakan bahwa di TPS dimana tempat ibu puer memilih pilihan politiknya semua berjalan lancar.

Selain ibu Puer adapula pedagang kaki lima binaan pemerintah kota yang peneliti wawancarai yaitu Bapak Ahmad di lokasi tempat beliau berdagang yaitu sentra PKL karah. Adapun pernyataan dari bapak Ahmad sebagai berikut:

> saya mengikuti pemilihan mbak yang kemaren terakhir ini 2015 ya… saya kan orangnya demokratis mbak hehe…meskipun saya ini rakyat kecil dan pilihan saya waktu itu yaa yang jadi wali kota sekarang ini mbak, bu risma itu pilihan saya. Kalau informasinya ya di TV itu kan ada berita ya sama Koran udah banyak dimana-mana beritanya dan kalau lagi kumpul sama temen2 atau

[15] Puer, *Wawancara*, Surabaya, 16 Maret 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarga gitu biasanya saling Tanya lah jagoannya siapa yaa sambil bercanda gitu mbak[16]

Seperti yang telah diungkapkan Bapak Ahmad bahawa dalam memberikan suara para pemilih sebelumnya mendapatkan informasi dari media elektronik dan media cetak. Dalam memberikan suara warga mendatangi tempat pemungutan suara dimana mereka terdaftar sebagai pemilih aktif. Yang mana pemilih benar-bernar tercatat sebagai individu yang memiliki hak pilih dalam daftar pemilih tetap. Hal ini sesuai dengan fungsi partisipasi politik yang disampaikan oleh Arbi Sanit dalam bukunya bahwa fungsi partisipasi politik salah satunya adalah memberikan dukungan kepada penguasa dan pemerintah yang dibentuknya beserta sistem politik yang dibentuknya.

Hal ini sesuai dengan pemikiran yang sebutkan oleh Huntington dan Nelson yaitu partisipasi otonom, dimana partisipasi politik yang didorong oleh keinginan pelakunya sendiri untuk melakukan tindakan tersebut.[17] Dalam bukunya disebutkan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertujuan mempengaruhi keputusan oleh pemerintah.

[16] Ahmad, *Wawancara*, Surabaya, 3 April 2017.

[17] Komarudin Sahid, *Memahami Sosiologi Politik*, (Bogor:Ghalia Indonesia,2011), hlm. 183.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun ketertarikan atas partisipasi para PKL binaan ini terhadap dunia politik sebenarnya merupakan apresiasi yang pantas diacungi jempol. Ada alasan sederhana yang melatar belakangi para PKL binaan ini untun andil dalam pesta demokrasi poltik. Hal tersebut dikutip dari pernyataan informan sebagai berikut:

> "Menjadi vote-getter (pemikat pemilih) bukan karena janji-janji yang diberikan.. toh kepemimpinannya bagus bukti nyatanya ada"[18]

Sama hal dengan yang disampaikan oleh Bapak Rudi:

> Kalau janji apa ya..nggk ada mbak. Setahu saya bu Risma ini tidak pernah janji cuman ya ngasih tahu program-programnya buat mendatang gitu mbak. Kalau saya lihat dari visi misinya kan memang bagus, saya milih itu karena udah jelas yang mau kita pilih itu seperti apa sih.. yak an!.[19]

Hal ini menurut pemikiran dari Gabriel Almond, partisipasi politik tidak hanya sebatas mengambil bagian atau peranan dalam konteks kegiatan politik. Akan tetapi, menurutnya partisipasi politik selalu diawali oleh adanya arkulturasi kepentingan dimana seorang individu mampu mengontrol sumber daya politik, seperti hanya seorang pemimpin partai politik atau seorang menciptakan militer. Peran mereka sebagai *aggregator* politik (penggalang/penyatu dukungan) akan sangat menentukan bagi bentuk partisipasi politik selanjutnya. Menurutnya, negara besar memiliki bangunan organisasi yang telah terspesialisasi dalam menyalurkan bentuk agregasi politik

[18] Wawan, *Wawancara*, Surabaya, 28 Oktober 2017.

[19] Rudi, *Wawancara*, Surabaya, 28 Oktober 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Kampanye

Salah satu kegiatan yang memberikan nilai lebih dari sekian proses dalam tahapan pemilu adalah kampanye. Hal ini disebabkan karena dalam kampanye setiap partai politik dan calon anggota legislatif berusaha dengan maksimal mengerahkan dengan segenap potensi dan kreativitas dalam menarik simpati massa.

Ada berbagai cara yang dilakukan oleh partai-partai politik maupun calon dalam menarik perhatian umum seperti panggung terbuka, pemberian bantuan dalam bentuk sembako maupun bangunan fisik, dan juga dalam bentuk kegiatan-kegiatan ilmiah dan keagamaan seperti diskusi terbuka. Kampanye yang dilakukan oleh partai-partai politik kepada para pedagang kaki lima binaan pemerintah kota ini berbentuk kunjungan ke sentra-sentra PKL binaan dan menghimbau agar para warga masyarakat memilih partai politik yang menjadi pilihannya, seperti yang sampaikan oleh ibu nur aini:

> Karena saya jualan kan kadang-kadang orang-orang partai itu kesini ya, yang calon-calonnya tuh pernah datang kesini makan gitu.. ya sekedar ngunjungi makan gitu.. pernah sih mbak datang kesini mbawak kalender, bawak kaos ya itu-itu aja.[20]

Senada dengan apa yang diungkapkan oleh ibu puer, salah satu pedagang yang memiliki nomor stan 8 di sentra PKL jambangan beliau mengungkapkan bahwa:

[20] Nur Aini, *Wawancara*, Surabaya, 15 Maret 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Dulunya sering mbak berkunjung kesini kebelakang liat-liat itu sering. Kalo dulunya pernah dari PDI itu ngasih gelas tapi pas berkunjung kerumah.. iya ngasih dirumah."[21]

Sama halnya dengan yang disampaikan Bapak Ahmad sebagai berikut:

> Kalau unuk kampanye sendiri saya dulu ragu untuk ikutan mbak karena kan saya sibuk jualan disini, tapi saya melihat semaraknya pemilu itu ya kemudian saya ikutan akhirnya mbak.. kebetulan istri juga mau diajak gentian untuk berjualan. Jadi saya akhirnya ikutan konvoi sama orang-orang PDI karena memang kan si Surabaya ini kebannyakan pendukung PDI gitu mbak.[22]

Dari hasil wawancara diatas dapat peneliti simpulkan bahwa dilihat dari kesibukan para PKL binaan untuk berjualan dengan keterbatasan waktu yang dimiliki namun tidak dapat memecahkan antusiasme meraka untuk tetap mengikuti kampanye dari tokoh-tokoh partai saat melakukan kujungan ke sentra-sentra PKL dimana mereka berjualan. Tidak lepas dari hal ini seperti yang telah disampaikan pula oleh Bapak Ahmad diatas bahwa dia juga melibatkan dirinya dalam kampanye yang di selenggarakan oleh partai tersebut. Hal ini merupakan sebuah bentuk antusiasme warga yang tinggi.

---

[21] Puer, *Wawancara*, Surabaya, 16 Maret 2017.

[22] Ahmad, *Wawancara*, Surabaya, 3 April 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Menjadi saksi dalam kegiatan pemilu

Berdasarkan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No.10 Tahun 2009 tentang tahapan-tahapan pemilihan umum yang salah satunya adalah mengenai pemungutan dan penghitungan suara, maka setiap partai politik diberikan kesempatan untuk mengirimkan saksi dalam proses tersebut. Dalam proses pemungutan suara dan penghitungan suara, di Surabaya selatan sendiri keterlibatan PKL binaan sebagai saksi juga turut mewarnai.

Secara struktural PKL binaan ini bukanlah pengurus yang ditugaskan secara kusus oleh partai melainkan mereka hanyalah sebagai relawan yang sukarela mau menjadi saksi dan pemantau dalam pemilu 2015. Umumnya mereka adalah warga yang memiliki semangat dan idealism yang kuat dalam mengawal proses pelaksanaan pemilu. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Ahmad sebagai berikut:

> Awalnya saya tidak menjadi saksi dalam kegiatan pemilu, namun beberapa saat setelah saya memberikan suara di TPS. Ada dari pihak TPS meminta saya untuk menjadi saksi, bisa disebut saya ini saksi relawan mbak. Dan memang pada pemilu di periode sebelumnya saya juga pernah menjadi saksi relawan dalam pemilu itu dengan sukarela. Yaa gapapa sih saya juga senang bisa membantu hitung-hitung saya juga penasaran sama hasilnya.[23]

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti peroleh dengan beberapa informan diatas dapat dijelaskan bahwa mereka termasuk orang yang aktif dalam pemilu meskipun mereka memilikiki kesibukan dikarenakan bejualan. Meskipun begitu meraka mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk tidak memilih dan tetap menggunakan hak pilihnya karena itu merupakan suatu

[23] Ahmad, *Wawancara*, Surabaya, 3 April 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keharusan sebagai warga negara untuk ikut serta dalam pemilu yang ada di Indonesia. Dengan harapan baik bahwa mereka menginginkan sosok pemimpin bertanggung jawab dan pedili terhadap rakyatnnya.

Membahas tentang bentuk partisipasi politik maka tidak bisa lepas dari landasan teori yang menjadi pijakannya. Dengan menggunakan teori sukarela yang digagas oleh McClosky yaitu partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalm proses pemilihan penguasa. Kontribusi lebih yang diberikan oleh para PKL binaa ini adalah untuk mamajukan sebuah Negara dengan berperan aktif dalam dunia politik atau ikut andil dalam pesta demokrasi diajang sebuah pemilihan umum.

Ketika berbicara mengenai bentuk partisipasi politik pedagang kaki lima binaan pemerintah kota di Surabaya selatan pada pemilihan kepala daerah 2015, secara sederhana peneliti memberikan analisa bahwa partisipasi PKL binaan ini tidak pernah lepas dari rasa antusias yang tinggi, sadar memiliki hak pilih, dan menggunakan hak pilih. Dengan demikian memposisikan sebagai partisipan tidak dapat di pisahkan dari sejumlah variabel yang ada. Keyakinan, lingkungan plitik memiliki ketertarika satu sama laindalam menentukan bentuk partisipasi politik pedagang kaki lima binaan pemerintah kota.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana telah dijelaskan pada bab petama maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Motif partisipasi politik pedagang kaki lima binaan pemerintah kota di Surabaya selatan dalam pilkada tahun 2015 adalah mereka berpartisipasi atas dasar pertimbangan rasional. Sebagian PKL binaan telah menilai secara objektif pilihannya dalam arti memiliki kesadaran diri dan secara sengaja sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab dua bahwa mereka berhasrat menjadi berpengetahuan, mempengaruhi suara legislator. Meski dengan adanya vote getter hal tersebut tidak mempengaruhi niat awal mereka untuk berpartisipasi berdasarkan pilihan yang yang telah ditentukan oleh diri mereka sendiri.
2. Bentuk partisipasi politik pedagang kaki lima binaan pemerintah kota di Surabaya selatan dalam pilkada tahun 2015 berdasarkan intensitasnya yakni sebagai partisipan yang aktif. Dimana PKL binaan dalam partisipasi politik tidak hanya sebatas mengambil bagian atau peranan dalam konteks kegiatan politik namun menunjukkan dalam bentuk pemberian suara atau votting, menjadi peserta kampanye dan menjadi saksi dalam kegiatan pemilu. Karena adanya keyakinan dalam diri individu dan rasa antusias yang cukup tinggi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan oleh penulis diatas, maka penulis perlu memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pedagang kaki lima binaan pemerintah kota lebih meningkatkan kualitas diri lagi agar dapat melakukan banyak peran terutama peran-peran diwilayah publik yang justru banyak bersinggungan dengan kepentingan politik.
2. Pedagang kaki lima binaan pemerintah kota perlu mengambil bagian secara lebih luas lagi dengan memberikan kontribusi lebih karena statusnya sebagai sosok yang dianggap mampu dan mempunyai potensi dalam bidang politik khususnya.
3. Para pedagang kaki lima binaan pemerintah kota bersama-sama dengan organisasi sosial masyarakat dan partai politik hendaknya dapat bekerja sama dalam mengajak untuk demokrasi kepada masyarakat agar peningkatan partisipasi politik masyarakat dapat lebih berkualitas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Arif Budiono. *Dampak Revitalisasi Alun-Alun Kota Kebumen Terhadap Perekonomian Pedagang Kaki Lima.* Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

Anwar Arifin. *Komunikasi Politik: Filsafat-Paradigma-Teori-Tujuan-Strategi dan Komunikasi Politik Indonsia*. Yogyakarta:GRAHA ILMU, 2011.

Dan Nimmo. *Komunikasi Politik Khalayak dan Efek*. Bandung:PT REMAJA ROSDAKARYA, 2006.

Engkus Kuswarno. *Fenomenologi:Konsepsi, Pedoman, dan Contoh Penelitiannya*. Bandung: Widya Padjadjaran, 2009.

Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Komarudin Sahid. *Memahami Sosiologi Politik.* Bogor:Ghalia Indonesia, 2011.

Kuntjaraningrat. *Metode-metode Penelitian Masyarakat.* Jakarta: Gramedia, 1997.

Laelah Kodariah. *Partisipasi Politik Siswa MAN II Yogyakarta Dalam Pemilukada Tahun 2011 Di Kota Yogyakarta*. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Mambau'ul Ulum. *Respon Pedagang Kaki Lima (PKL) Terhadap Kebijakan Relokasi (Studi Kasus di Pagiyuban PKL Demantu Yogyakarta.)* Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Marlini Tarigan. *Partispasi Masyarakat Kabupaten Temanggung Dalam Pelaksanaan Pilkada Tahun 2008.* Program Studi Magister Ilmu Politik, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2009.

Martin Roderick. *Sosiologi Kekuasan*. Jakarta:CV. Rajawali, 1990.

Miriam Budiarjo. *Demokrasi di Indonesia; Demokrasi Parlemen dan Demokrasi Pancasila.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995. Dikutip dari Herbert McClosky, "*Political participation*", *International Encyclopedia of the Social Sciences*, edisi ke-2 (New York: The Macmillan Company and The Free Press, 1972), XII.

Miriam Budiardjo. *Partisipasi Politik.* Jakarta: PT. Gramedia, 1998.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Miriam Budiardjo. *Partisipasi dan Partai Politik Sebuah Bunga Rmpai*. Jakarta: Yauyasan Obor Indonesia, 1998.

Muhammad Mukhlasin. *Hubungan Antara Persepsi Terhadap Politik Dengan Minat Partisipasi Politik Pada Siswa Kelas X SMA N 1 (Teladan) Yogyakarta.* Fakultas Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Muhammad Musthofa. *Peran dan Partisipasi Politik Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa (PPKB) Di DPRD D.I.Yogyakarta Periode 2009-2014*. Fakultas Syri'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Nur Fitriana Kusumaningtyas. *Respon Pedagan Klithikan Terhadap Implementasi Kebijakan Penataan PKL (Studi Relokasi Pasar Klithikan di jalan Mangkubumi Yogyakarta).* Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Purba Omta. *Hubungan Tingkat Kesadaran Politik Dengan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Kegiatan Pemilukada 2010 Di Kelurahanan Timbangan Kecamatan Inderalaya Utara Kabupaten Ogan Ilir*. Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, 2013.

Ramlan Surbakti. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia, 1999

Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang.* Alih bahasa Sahat Simamora. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

Hasil wawancara

Niah, *Wawancara,*Surabaya, 15 Juni 2017.

Puer, *Wawancara*, Surabaya, 16 Juni 2017.

Ahmad, *Wawancara*, Surabaya, 3 Agustus 2017.

Nur aini, *wawancara*, Surabaya, 15 Juni 2017.

Wawan, *Wawancara*, Surabaya, 28 Oktober 2017

Rudi, *Wawancara*, Surabaya, 28 Oktober 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber Internet

www.kopertis4.or.id/aturan/undang undang/uu ttg Pemerintah dan daerah/No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Penjelasannya, 20 Juli 2008 pukul 20.10

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Wali_Kota_Surabaya_2015

www.surabaya.go.id>files>doc_765, 22 maret 2017 pukul 09:10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id